

**Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin
Di Kabupaten Aceh Selatan**

SKRIPSI

Oleh:

MIKA RAHMAYUNI

NIM. 150802068

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Prodi Ilmu Administrasi Negara



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM AR-RANIRY BANDA ACEH
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Administrasi Negara

Diajukan Oleh:

MIKA RAHMAYUNI

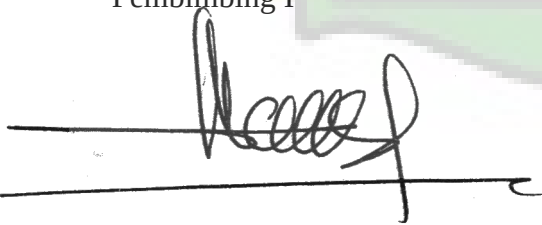
NIM. 150802011

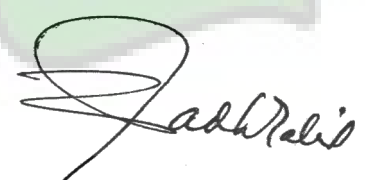
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhammad AR, M. Ed
NIP. 196007211997031001


Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.
NIDN. 2019119001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara

Diajukan oleh:

MIKA RAHMAYUNI
NIM. 150802068

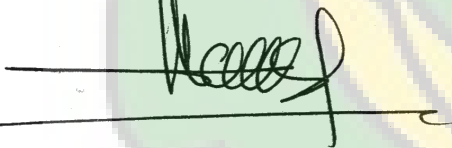
Pada Hari/Tanggal

Jum'at, 3 Januari 2020 M
8 Jumadil Awal 1441 H

Di

Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Dr. Muhammad AR, M.Ed
NIP. 196007211997031001

Sekretaris,



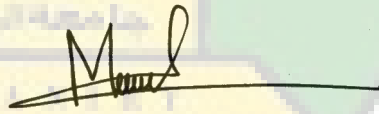
Zakki Fuad Khalil, S.IP. M.Si.
NIDN. 2019119001

Penguji I,



Cut Zamharira, S.IP., M.AP
NIDN. 2017117904

Penguji II,



Muazzinah, B.Sc., MPA
NIDN. 198411252019032012

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mika Rahmayuni
NIM	: 150802068
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas	: UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri, dan belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan, serta dapat diperoleh sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan oleh siapapun.

Banda Aceh, 21 Desember 2019
Penulis,



Mika Rahmayuni

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan membahas tentang Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dimana program KUBE merupakan salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program KUBE di Kabupaten Aceh Selatan beserta hambatannya. Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun yang menjadi informan kunci adalah Kepala Dinas Sosial, Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin, tenaga pendamping, dan anggota kelompok penerima bantuan KUBE. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program KUBE di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2015 sampai 2017 hanya 40% yang mencapai tahap perkembangan, tahap kemitraan 10-15%, sehingga implementasi masih belum maksimal. Adapun hambatan pelaksanaan program KUBE ini 40% tenaga pendamping yang aktif mendampingi, selanjutnya Standard Operating Procedure (SOP) pelaksana program KUBE di Kabupaten Aceh Selatan belum ada sehingga masih mengacu pada petunjuk dari Kementerian Sosial RI. Kesimpulan penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah melaksanakan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sesuai dengan aturan KUBE yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI. Pemerintah perlu menetapkan langkah-langkah melalui program kerja KUBE setiap periode, dan profesionalitas pendamping, dan perlu meningkatkan koordinasi antar stakeholder dalam pembinaan dan pengembangan usaha KUBE.

Keyword: Program KUBE, Kesejahteraan Masyarakat Miskin



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada umat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Sholawat beriring salam kita sanjungsajikan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat, berkat beliau kita dapat merasakan manisnya ilmu seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Adapun judul skripsi ini, yaitu: “Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Aceh Selatan”.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi beban studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibunda tercinta dan keluarga yang telah mengasuh, mendidik, dan mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sampai ke perguruan tinggi ini. Semoga jerih payah dan ketulusan ibunda dan keluarga mendapat balasan yang setimpal disisi Allah SWT.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak luput dari berbagai tantangan dan hambatan. Namun itu dapat penulis selesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan dan pahala yang setimpal. Amin.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis turut menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin. AK, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Reza Idria, S.H.I., MA, selaku ketua prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Terimakasih kepada Pembimbing I, Dr. Muhammad AR, M. Ed dan Pembimbing II Bapak Zakki Fuad Khalil, SIP., M.Si yang telah banyak mengorbankan waktu dan tenaganya untuk membimbing kami dan selalu memberi masukan dengan penuh kesabaran dan keihklasan.
5. Terimakasih kepada Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag selaku penasehat akademik yang telah banyak membantu dalam rencana studi selama perkuliahan.
6. Terimakasih kepada seluruh Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingannya selama ini dalam mengikuti perkuliahan.
7. Terimakasih kepada staff yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan yang telah ikut membantu proses kelancaran penulisan skripsi.
8. Terimakasih kepada Bapak Dumairi selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan, dan seluruh staff terutama Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin yang telah banyak memberikan bantuan informasi dan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.
9. Terimakasih kepada tenaga Pendamping KUBE yang ada di setiap Kecamatan, dan juga kepada kelompok anggota KUBE yang telah berpartisipasi dan meluangkan waktunya bagi penulis untuk mendapatkan informasi.
10. Terimakasih kepada seluruh sahabat prodi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2015, sahabat KPM Gampong Santan, sahabat satu rumah selama di Banda Aceh, yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka diharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk keberhasilan penulisan selanjutnya. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan demikian penulis sampaikan atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 November 2019
Penulis,

Mika Rahmayuni



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING LEMBAR	
PENGESAHAN SKRIPSI LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
 BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Penelitian Terdahulu.....	9
 BAB II: LANDASAN TEORI	
2.1 Implementasi.....	12
2.1.1 Pengertian Implementasi.....	12
2.1.2 Model-Model Implementasi.....	13
2.2 Kelompok Usaha Bersama (KUBE).....	17
2.2.1 Pengertian Kelompok Usaha Bersama (KUBE).....	17
2.2.2 Kategori Kelompok Usaha Bersama (KUBE).....	19
2.2.3 Indikator Keberhasilan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).....	20
2.3 Kesejahteraan Masyarakat.....	22
2.3.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat.....	22
2.3.2 Konsep Kesejahteraan.....	23
2.4 Kerangka Berfikir.....	28
 BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30
3.2 Lokasi Penelitian.....	30
3.3 Sumber Data.....	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.5 Teknik Analisis Data.....	34
 BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Tempat Penelitian.....	36
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Selatan.....	36
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan...	37
4.1.3 Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan.....	38

4.1.4 Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Aceh Selatan.....	41
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	45
4.2.1 Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama KUBE) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Selatan	45
4.2.2 Hambatan Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Aceh Selatan.....	56
4.3 Pembahasan.....	66
BAB V: PENTUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing

Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 3 : Surat Pemberitahuan Selesai Penelitian

Lampiran 4 : Dokumentasi



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data Persentase Angka Kemiskinan Di Provinsi Aceh Tahun 2016-2017

Tabel 2: Jumlah Tenaga Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan

Tabel 3: Jumlah Eselon Tenaga Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Aceh Selatan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang kemiskinan merupakan topik yang sering dibicarakan dan merupakan salah satu masalah yang serius. Kemiskinan diartikan sebagai sebuah keadaan yang terjadi karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Sesuai amanat konstitusi negara, yaitu pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dalam Bab II Pasal 3 ayat 3, mengandung makna bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan kemampuan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.¹

Permasalahan kemiskinan harus diselesaikan bersama oleh semua pihak baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Oleh karena itu pemerintah membuat program sebagai bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial” Pasal 3 ayat 1-3 dan Pasal 4.

masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.² Salah satu program penanggulangan kemiskinan tersebut adalah program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin.

Provinsi Aceh tingkat kemiskinan sangat beragam dari tahun ke tahun baik mengalami peningkatan maupun penurunan angka kemiskinan. Sehingga Aceh masih menyandang status predikat penduduk miskin ke-6 di Indonesia. Salah satu Kabupaten di provinsi Aceh yang mengalami peningkatan angka kemiskinan adalah Aceh Selatan. Tingkat kemiskinan Aceh Selatan pada tahun 2010 mencapai 15,93 %, tahun 2011 mencapai angka 15,52 %, tahun 2012 mencapai angka 14,81 %, tahun 2013 mencapai angka 13,24 %, dan pada tahun 2015 mencapai angka 13,24 %, dan selanjutnya tahun 2016 mencapai angka 13,48 %. Dari data tersebut menunjukkan bahwa angka kemiskinan terus menurun. Namun di tahun 2016 pencapaian angka kemiskinan justru meningkat sebanyak 0,24 % tidak mencapai 1 %. Berdasarkan catatan selama periode 2015-2016 dari 23 kab/kota mengalami angka kenaikan kemiskinan yaitu Kab. Pidie, Aceh Utara dan Aceh Selatan.³

Aceh Selatan sebelumnya berhasil menekan angka kemiskinan per tahunnya, dan menjadi empat daerah yang terendah tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Namun pada tahun 2015-2016 Aceh Selatan mengalami kenaikan

² Republik Indonesia, “ Peraturan Presiden RI Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan” Pasal 1 ayat 2.

³BPS : Aceh Selatan Dalam Angka Tahun 2010-2015.

angka kemiskinan dan masuk kedalam kategori 3 daerah penyumbang angka kemiskinan. Daerah yang mengalami penurunan angka kemiskinan seperti Aceh Tenggara tingkat kemiskinannya pada periode 2015-2016 menurun dari 14,91 % menjadi 14,46 %, kemudian Aceh Barat dalam periode yang sama angka kemiskinan menurun dari 21,46 % menjadi 20,38 %, dan Aceh Singkil juga mampu menurunkan angka kemiskinannya dari 21,72 % hingga menjadi 21,60 %.⁴

Selanjutnya berdasarkan hasil temuan Institute for Development of Acehnes Society (IDeAS) mempublikasikan bahwa, dari jumlah 23 Kabupaten dan Kota di Aceh, 18 kabupaten dan kota diantaranya menunjukkan angka kemiskinan semakin meningkat.

Tabel. 1.1 Data Persentase Angka Kemiskinan Di Provinsi Aceh Tahun 2016-2017

No	Kabupaten/Kota	Persentase penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		Perbandingan Tahun 2016 dengan 2017
		Tahun 2016	Tahun 2017	
1	Aceh Singkil	21,60	22,11	Naik
2	Gayo Lues	21,86	21,97	Naik
3	Pidie Jaya	21,18	21,82	Naik
4	Pidie	21,25	21,43	Naik
5	Bener Meriah	21,43	21,14	Turun
6	Aceh Barat	20,38	20,28	Turun
7	Simeuleu	19,93	20,2	Naik
8	Subulussalam	19,57	19,71	Naik
9	Aceh Utara	19,46	19,78	Naik

⁴ IDeAS (Institute for Development of Acehnes Society), Tahun 2015-2016.

10	Nagan Raya	19,25	19,34	Naik
11	Aceh Barat Daya	18,03	18,31	Naik
12	Sabang	17,33	17,66	Naik
13	Aceh Tengah	16,64	16,84	Naik
14	Bireun	15,95	15,87	Turun
15	Aceh Besar	15,55	15,41	Turun
16	Aceh Timur	15,06	15,25	Naik
17	Aceh Tenggara	14,46	14,86	Naik
18	Aceh Jaya	15,01	14,85	Turun
19	Aceh Tamiang	14,51	14,69	Naik
20	Aceh Selatan	13,48	14,07	Naik
21	Lhokseumawe	11,98	12,32	Naik
22	Langsa	11,09	11,24	Naik
23	Banda Aceh	7,41	7,44	Naik

Sumber: IDEAs (*Institute for Development of Acehnes Society*) Data diolah dari Publikasi BPS RI Tahun 2018.

Hal tersebut sejalan dengan Data Kemiskinan Kota seluruh Indonesia Tahun 2017. Catatan IDEAS selama periode 2016-2017 ada 17 kabupaten dan kota di aceh yang mengalami kenaikan angka kemiskinan, termasuk kota banda aceh.

Menanggulangi tingkat kemiskinan Kabupaten Aceh Selatan, pemerintah menerapkan beberapa program penguatan ekonomi masyarakat dengan strategi mendorong kemandirian usaha-usaha kelompok masyarakat melalui kelompok usaha bersama (KUBE).Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemos RI).⁵

⁵Purnama sari, “*Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera*”, jurnal Moderat Vol. 3 No. 2, 2017, hlm. 101.

Program ini merupakan pemberian bantuan dana sebagai modal untuk membentuk usaha ekonomi produktif (UEP), program tersebut juga merupakan program unggulan Kementerian Sosial dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Indikator capaian keberhasilan program KUBE adalah terwujudnya kemandirian keluarga fakir miskin penerima bantuan UEP (Usaha Ekonomi Produktif).

Program ini merupakan target utama dari pembangunan desa. Bagi fakir miskin KUBE adalah sarana dalam meningkatkan usaha ekonomi produktif (khususnya dalam peningkatan pendapatan), memotivasi warga miskin untuk lebih maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan intraksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitran sosial ekonomi dengan pihak terkait. Sehingga akan terbentuk sumber daya manusia yang utuh dan mempunyai tanggung jawab sosial ekonomi terhadap diri, keluarga dan masyarakat serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Sasaran program ini adalah keluarga fakir miskin. Kriteria yang menjadi kelompok sasaran program yaitu kepala atau anggota yang mewakili keluarga fakir miskin, memiliki identitas kependudukan, mempunyai usaha atau berniat membuka usaha, usia produktif dan memiliki keterampilan, mampu bertanggung jawab sendiri, dan bersedia mematuhi aturan KUBE FM (kelompok usaha bersama fakir miskin).⁶

⁶ Hendrik Yasin, "Upaya Strategis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube)", jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 5 No. 1, 2015, hlm. 39.

KUBE dibentuk oleh masyarakat yang berdomisili dalam satu wilayah yang sama dan memiliki usaha yang sama, beranggotakan 8-10 orang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. Jenis usaha bisa berupa pertanian, perikanan, dan aneka usaha kerajinan rumah tangga. Bantuan bisa berupa cash transfer via rekening kelompok sebesar Rp. 20.000.000 per kelompok, yang digunakan sebagai modal untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif. Selain itu, bantuan yang diberikan juga berbentuk barang sesuai dengan jenis usaha yang dikelola.

Kabupaten Aceh Selatan sebagai salah satu yang melaksanakan program tersebut dalam upaya mengentaskan kemiskinan belum menunjukkan hasil yang optimal. Program tersebut masih dihadapkan pada suatu kendala yaitu pola pikir dan kemauan masyarakat Aceh Selatan untuk maju dan berkembang masih rendah, terbatasnya sumber daya manusia yang profesional, kurangnya pemahaman para penerima bantuan modal usaha, terbatasnya tenaga kerja terampil, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti petunjuk program pemberdayaan yang telah disosialisasikan. Sehingga implementasi program dan kegiatan yang dijalankan pemerintah tidak 100% berjalan, perlu adanya perbaikan sumberdaya manusia dan pola pikir masyarakat.⁷

Mengingat Pelaksanaan KUBE yang dilaksanakan masyarakat sangat tergantung pada kondisi masyarakat itu sendiri, secara otomatis memunculkan berbagai bentuk/pola KUBE yang masing-masing memberikan dampak keberhasilan yang berbeda. Maka untuk meningkatkan akselerasi keberhasilan

⁷ Diskusi awal peneliti dengan Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Kabupaten Aceh Selatan. Tanggal 23 Agustus 2019.

KUBE pada setiap daerah khususnya Kabupaten Aceh Selatan, maka perlu dilakukan studi terhadap pelaksanaan KUBE yang ada dimasyarakat agar diperoleh tingkat keberhasilannya. Berdasarkan uraian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Aceh Selatan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses implementasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Selatan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program KUBE di Kabupaten Aceh Selatan ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Aceh Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, apakah sudah terlaksana secara baik atau belum.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung implementasi program KUBE di Kabupaten Aceh Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah untuk pengembangan ilmu/manfaat teoritis, dan juga manfaat praktis untuk membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek yang diteliti.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap kajian ilmu implementasi kebijakan publik. Menjadi sumber wawasan dan pengetahuan untuk para pembaca, berkaitan dengan implementasi KUBE dan diharapkan menjadi acuan bagi penelitian sejenis.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah khususnya bagi Pemkab Kabupaten Aceh Selatan dan pihak lain yang berwenang dalam pelaksanaan program KUBE pada tahun selanjutnya.

1.5. Penelitian Terdahulu

Secara keseluruhan untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul, maka peneliti melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian dahulu yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah:

Jheniar Evriliany Akmel (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Efektifitas Program Raskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam”. Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian Analisis Efektifitas Program Raskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam di kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, menunjukkan bahwa kebijakan pendistribusian raskin berhasil apabila 6 indikator kebijakan penentu program raskin dapat terpenuhi dengan baik dan itu akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun dalam pendistribusian beras miskin di lapangan terdapat 4 indikator yang tidak terlaksana dengan baik, yaitu tepat sasaran, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat waktu. Program raskin di Kecamatan Sukarame hanya berfungsi sebagai penekan biaya pengeluaran rumah tangga miskin.⁸

Ahmad Imaduddin (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Pemberdayaan Fakir Miskin Binaan Dinas Sosial Wilayah Kecamatan Samarinda Utara Di Kota Samarinda”. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk mendapatkan deskripsi yang mendalam tentang Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama Dalam Pemberdayaan Fakir Miskin, yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan fakir miskin pada

⁸ Jheniar Evriliany Akmel, Skripsi: “Analisis Efektifitas Program Raskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam” (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 101-103.

Kelompok Usaha Bersama Binaan Dinas Sosial wilayah Kecamatan Samarinda Utara meskipun belum mencapai hasil yang optimal tetapi secara implementatif program tersebut cukup efektif dan berhasil sesuai sasaran terhadap penyaluran dana kepada Kelompok Usaha Bersama di wilayah Kecamatan Samarinda Utara.⁹

Mulia Oktariani (2017) judul penelitian “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung”. Penelitian menggunakan metode Kualitatif. Hasil penelitian menggunakan teknik triangulasi menunjukkan bahwa implementasi program keluarga harapan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di kelurahan Dago, kecamatan Coblong, Kota Bandung belum berhasil. Walaupun serangkaian tahapan berjalan lancar, sumberdaya yang dimiliki meliputi staf, kewenangan, informasi dan fasilitas maupun kemampuan pelaksana (disposisi) program keluarga harapan di kelurahan Dago telah memberikan kontribusi pada pelaksanaan PKH, dan para pelaksana di kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung juga telah menjalankan tugas sesuai dengan Standard Operational Procedures (SOP). Namun dalam implementasi program keluarga harapan masih ditemui hambatan antara lain, tidak tersedianya tempat bagi pendamping dalam melakukan pertemuan dengan peserta penerima bantuan, keterbatasan jumlah pendamping yang menangani lebih dari satu

⁹Ahmad Imaduddin, “Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Pemberdayaan Fakir Miskin Binaan Dinas Sosial Wilayah Kecamatan Samarinda Utara Di Kota Samarinda” 2016.

kelurahan serta sikap dari penerima bantuan program keluarga harapan itu sendiri.¹⁰

Oleh karena itu dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi berbagai program bantuan sosial masih belum optimal, masih terdapat permasalahan yang harus diselesaikan baik dari segi kinerja petugas, pengelolaan anggaran, dan masalah yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada jenis program yang dijalankan, disini peneliti mengambil satu program yang sama yaitu program KUBE untuk melihat bagaimana keberhasilan implementasinya di daerah lainnya.

¹⁰Mulia Oktariani, “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung” 2017.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.¹¹ Secara umum, implementasi menghubungkan tujuan-tujuan kebijakan terhadap hasil-hasil kegiatan pemerintah. Ketidak berhasilan implementasi suatu kebijakan disebabkan keterbatasan sumber daya manusia, struktur organisasi yang kurang memadai, dan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.¹²

Merille S. Grindle implementasi kebijakan adalah suatu fungsi dari implementasi program. Implementasi kebijakan sangat tergantung atas implementasi program dengan asumsi bahwa program-program kenyataannya secara tepat menjadi tujuan kebijakan. Jadi pada dasarnya implementasi kebijakan sama dengan implementasi program itu sendiri.¹³

Salah satu pendapat tentang keberhasilan atau kegagalan dari implementasi disampaikan oleh D.L. Weimer dan Aidan R. Vining (1999), menurut mereka ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan, (1) logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai seberapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara

¹¹ Yeremias T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. (Yogyakarta: Gava Media, 2014), hlm. 76.

¹² Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 539.

¹³ Michael S. Mantiri, "Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe", *jurnal....* Vol. 1, No. 2, tahun..., hlm 2.

kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan; (2) hakekat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu *assembling* yang produktif, dan (3) ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.¹⁴

2.2. Model-model Implementasi

Apapun produk kebijakan itu, pada akhirnya bermuara pada tataran bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut teraktualisasi. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Berikut ini beberapa model teori implementasi yang dijadikan sebagai landasan diantaranya:

1. Model George Edward III

Menurut Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:¹⁵

- (1) Komunikasi
- (2) Sumberdaya
- (3) Disposisi
- (4) Struktur Birokrasi.

¹⁴Michael S. Mantiri, *Ibid.*, hlm. 78

¹⁵ Ahmad Nur Bakhtiar, "Implementasi program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Berbah Sleman Tahun 2013", jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik Vol. 2 No. 2, 2015, hlm. 211-212.

2. Model Van Meter dan Van Horn

Model yang diperkenalkan menegaskan bahwa “Implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik”. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi dan yang menyangkut dalam proses kebijakan publik adalah:¹⁶

- (1) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
- (2) Karakteristik dan agen pelaksana/implementor
- (3) Kondisi ekonomi, sosial dan politik
- (4) Kecenderungan (disposition) dari pelaksana/implementor.

3. Model Merilee S. Grindle

Pelaksana kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy); dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran tertuang dalam isi kebijakan; jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran; sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; apakah penempatan lokasi program sudah tepat; apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan pelaksanaannya secara detail; dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.¹⁷

¹⁶Asna Aneta, “Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo”, jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 1, 2010, hlm. 56.

¹⁷Abdullah Ramadhani, “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik”, jurnal Publik Vol. 11 No. 1, 2017, hlm. 6.

4. Model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabateir

Model implementasi ini bersifat sentralistis (dari atas ke bawah) dan lebih berada di mekanisme paksa dari pada mekanisme pasar. Implementasi kebijakan berdasarkan model pendekatan sentralistis akan menjadi efektif apabila memenuhi enam syarat, yaitu:¹⁸

- (1) Adanya tujuan yang jelas dan konsisten
- (2) Memiliki teori kausal yang memadai tentang bagaimana cara melahirkan perubahan
- (3) Mempunyai struktur implementasi yang disusun secara legal
- (4) Para pelaksana implementasi yang memiliki keahlian dan komitmen
- (5) Adanya dukungan dari kelompok kepentingan dan penguasa
- (6) Adanya perubahan dalam kondisi sosio-ekonomi yang tidak melemahkan dukungan kelompok dan penguasa.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model teori Van Meter dan Van Horn, dimana proses implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel, variabel tersebut adalah : ukuran kebijakan; sumberdaya; komunikasi organisasi; karakteristik agen pelaksana serta lingkungan kebijakan.¹⁹

¹⁸Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. (Jakarta Pusat: PT Pustaka Indonesia Press, 2011), hlm. 117-118.

¹⁹Mahendra Purnama Yahya, "Implementasi Program Bantuan Pemerintah Dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula Di Kementerian Koperasi Dan UKM (Studi Pada Kabupaten Lombok Tengah)", *jurnal Profit* Vol. 12 No. 2, 2018, hlm. 33.

5. Model Implementasi kebijakan Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn

Implementasi kebijakan ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni :²⁰

a. Standar dan sasaran kebijakan

Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran yang jelas dan terukur.

b. Sumberdaya

Dalam suatu implementasi kebijakan publik perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (human resources), maupun sumberdaya material (material resources), dan sumberdaya metoda (method resources).

c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan kapasitas

Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi terkait yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi.

d. Karakteristik agen pelaksana

Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan

²⁰Oktavianus Kondorura, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda", e-jurnal Administrasi Negara Vol. 6 No. 1, 2018, hlm. 5.

mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.

e. Disposisi implementor

Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi 3 hal, yaitu (a) respon implementor terhadap kebijakan yang terkait dengan kemajuan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

f. Lingkungan Sosial, ekonomi dan politik

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat dan opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

2.1 Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

2.1.1 Pengertian Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) adalah himpunan dari keluarga yang tergolong miskin dengan keinginan dan kesepakatan bersama

membentuk suatu wadah kegiatan, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsa sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama.²¹

Kemudian pengertian lainnya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu media untuk membangun kemampuan untuk memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan, melaksanakan peran sosial dengan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga miskin, yang mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi.²²

KUBE adalah program yang bertujuan meningkatkan kemampuan anggota KUBE di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, ditandai dengan meningkatnya pendapatan keluarga; meningkatnya kualitas pangan, sandang, papan, kesehatan, tingkat pendidikan; meningkatnya kemampuan anggota KUBE dalam mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam menampilkan peranan-peranan sosialnya, baik dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya.

Sasaran program KUBE adalah keluarga miskin produktif (orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan) atau

²¹ Republik Indonesia, "Departemen Sosial Tahun 2005 Tentang Kelompok Usaha Bersama".

²² Republik Indonesia, "Kementrian Sosial Tahun 2010 Tentang Kelompok Usaha Bersama".

orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan; keluarga miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraannya atau mengalami penghentian penghasilan.²³

2.1.2 Kategori Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Kategori KUBE pada dasarnya masuk ke dalam 3 tingkatan, yaitu KUBE tumbuh, KUBE berkembang, dan KUBE mandiri. Masing-masing kategori memiliki kriteria penilaian diantaranya:

- 1) KUBE tumbuh adalah kelompok usaha bersama yang baru dibentuk oleh masyarakat maupun pemerintah. Kriteria KUBE Tumbuh yaitu:²⁴
 - a. Sudah ada pengadministrasian kegiatan
 - b. Memiliki struktur organisasi
 - c. Jangkauan pemasaran terbatas
 - d. Asset terbatas
 - e. Usia KUBE kurang dari setahun.
- 2) KUBE berkembang adalah sekelompok usaha bersama yang sudah mengalami perkembangan dalam segala bidang. Kriteria KUBE berkembang yaitu:²⁵

²³Kabinet Indonesia Bersatu II, *Program Penanggulangan Kemiskinan*. (Kementrian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik: 2011), hlm. 38-39

²⁴Kabinet Indonesia Bersatu II, *Ibid.*, hlm. 21-22

²⁵Kabinet Indonesia Bersatu II, *Ibid.*, hlm. 22

- a. Administrasi lengkap
 - b. Berkembangnya organisasi
 - c. Bertambahnya jangkauan pemasaran
 - d. Bertambahnya akses
 - e. Berkembangnya asset.
- 3) KUBE mandiri adalah kelompok usaha bersama yang telah mengalami kemajuan diberbagai bidang. Kriteria KUBE mandiri yaitu:²⁶
- a. Administrasi lengkap
 - b. Berkembangnya organisasi
 - c. Bertambahnya jangkauan pemasaran
 - d. Berkembangnya asset
 - e. Dapat mengakses lembaga keuangan
 - f. Membentuk lembaga keuangan mikro atau koperasi.

2.1.3 Indikator Keberhasilan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Permensos No. 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama (KUBE) keberhasilan KUBE diukur berdasarkan 3 aspek indikator:

- a. Kelembagaan
- b. sosial, dan
- c. ekonomi

²⁶ Istiana Hermawati, *Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*. (Yogyakarta: Gava Media, 2011), hlm. 17

Peraturan Dirjen pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan Nomor 268/DYS-PK.5/KPTS/05/2015 menyebutkan tujuan umum Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui terwujudnya penghidupan yang berkelanjutan dan juga meningkatkan

keberfungsian sosial para anggota kelompok. Sedangkan tujuan khusus KUBE yaitu:

- a. Meningkatnya kemampuan anggota dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- b. Meningkatnya kemampuan anggota dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi khususnya dalam pengembangan usaha.
- c. Meningkatnya kemampuan dalam menjalankan peranan sosial di masyarakat.

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan KUBE antara lain:

1. Meningkatnya pendapatan keluarga miskin (anggota KUBE)
2. Meningkatnya kemandirian usaha sosial ekonomi keluarga miskin
3. Meningkatnya aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan sosial dasar dan fasilitas pelayanan publik
4. Meningkatnya kepedulian dan tanggung jawab sosial anggota KUBE di dalam masyarakat
5. Meningkatnya ketahanan sosial di dalam anggota KUBE dalam mencegah masalah-masalah sosial dan kemiskinan.

Program KUBE dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang telah dirumuskan dalam petunjuk teknis Kementerian Sosial RI, diantaranya:

- a. Tahap persiapan
- b. Tahap pelaksanaan
- c. Tahap pengembangan usaha
- d. Tahap menjalin kemitraan.

2.2 Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.²⁷ Dari penjelasan Undang-Undang dapat dilihat bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan berupa material dapat dikaitkan dengan pendapatan yang akan mewujudkan kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan spiritual dapat dikaitkan dengan pendidikan, keamanan, dan ketentraman hidup.

Menurut kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur, dan selamat. Menurut W.J.S Poerwadarminta kesejahteraan dapat diartikan sebagai kata ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang

²⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial”.

terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahiriah maupun batiniah.²⁸

2.2.3 Konsep Kesejahteraan

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu: (1) rasa aman (*security*), (2) kesejahteraan (*welfare*), (3) kebebasan (*freedom*), (4) jati diri (*identity*).²⁹ Indikator-indikator yang dijadikan tolak ukur peningkatan kesejahteraan diantaranya:

1. Rasa aman (*security*), hak atas rasa aman merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar. setiap manusia pasti membutuhkan hak atas rasa aman terhadap dirinya, dalam hal ini keamanan merupakan komponen penting agar terpenuhinya hak atas rasa aman pada masyarakat yang ada.
2. Kesejahteraan (*welfare*) merupakan kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
3. Kebebasan (*freedom*), secara sederhana dan klasik kebebasan adalah ‘tidak adanya larangan’. Meskipun demikian, konsep dasar “kebebasan” juga

²⁸Amirus Sodik, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”, jurnal Ekonomi Syariah Vo. 3 No. 2, 2015, hlm. 383-384.

²⁹Ahmad Sururi, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak”, jurnal Administrasi Negara Vol. 3 No. 2, 2015, hlm. 7.

harus memperhatikan “tidak adanya intervensi” dari kebebasan orang lain. Jadi ada dua kebebasan yang seimbang, yakni bebas untuk melakukan dan bebas untuk tidak diintervensi oleh tindakan tersebut.

4. Jati diri (*identity*), merupakan ciri khas yang istimewa dan unik (dari segi adat, bahasa, budaya, agama, dan sebagainya) yang menjadi lambang kepribadian seseorang atau suatu bangsa. Setiap orang tentunya memiliki jati diri yang berbeda oleh karena itu perlu adanya sikap menghargai baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.³⁰

Secara nasional terdapat dua versi pengukuran kesejahteraan keluarga yaitu, pengukuran kesejahteraan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menurut BPS mengukur tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari 7 indikator diantaranya:³¹

- 1) Kependudukan
- 2) Pendidikan, ada 3 indikator yang dilihat yaitu: angka partisipasi sekolah; tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan; dan angka buta huruf.
- 3) Kesehatan, dilihat dari angka kesakitan; penolong kelahiran; dan angka pengharapan hidup.
- 4) Fertilitas dan Keluarga Berencana (KB)
- 5) Pola konsumsi

³⁰Supriyatin, “Analisis Dampak Pelaksanaan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Asli Papua Di Kabupaten Mimika” jurnal Kritis (kebijakan, riset dan inovasi) Vol. 2 No. 2, 2017, hlm. 9-11.

³¹Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2013

- 6) Ketenagakerjaan, status pekerjaan menjadi 7 macam, yaitu berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu dengan buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas serta pekerja keluarga.
- 7) Perumahan.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menentukan indikator tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 tahapan yaitu:³²

- a. Keluarga Sejahtera I (KS) dengan kriteria :
 1. Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih
 2. Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda dirumah/pergi/bekerja/sekolah.
 3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap dan lantai.
 4. Bila ada anggota keluarga yang sakit di bawa ke sarana kesehatan.
 5. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi sarana pelayanan kontrasepsi.
 6. Semua anak umur 7-45 tahun dalam keluarga bersekolah.
- b. Keluarga Sejahtera II (KS II), kriteria:
 1. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah agama.
 2. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan lauk/daging/telur.
 3. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.

³²Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2014.

4. Luas lantai paling kurang 8 m² untuk tiap penghuni.
 5. Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat.
 6. Ada seseorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
 7. Anggota keluarga umur 10-60 bisa baca tulis latin.
 8. PUS dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini memakai alat kontrasepsi.
- c. Keluarga Sejahtera tahap III, meliputi:
1. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
 2. Sebagian penghasilan keluarga di tabung dalam bentuk uang dan barang.
 3. Keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari untuk berkomunikasi.
 4. Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal.
 5. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/TV/radio.
- d. Keluarga Sejahtera tahap III plus, meliputi:
1. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan meteril untuk kegiatan sosial.
 2. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus pengumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.

Adapun 5 tahapan tingkat kesejahteraan keluarga yaitu:

1. Tahapan keluarga Pra Sejahtera (KPS) yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 indikator Sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” (*basic needs*). Misalnya seperti pangan, sandang, papan, dan kesehatan.
2. Tahapan Keluarga Sejahtera I yaitu keluarga mampu memenuhi 6 indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 indikator “kebutuhan psikologis” (*psychological needs*). Pada tahap ini keluarga telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya seperti pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, dan transportasi.
3. Tahapan Keluarga Sejahtera II yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator tahapan KS I dan 8 indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator “kebutuhan pengembangan” (*developmental needs*) dari keluarga. Tahap ini keluarga telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, juga telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan berkembang/perkembangannya seperti menabung, memperoleh informasi, transportasi dan lainnya.
4. Tahapan Keluarga Sejahtera III yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator KS I, 8 indikator KS II, dan 5 indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III

Plus) atau indikator “aktualisasi diri” (*self esteem*) keluarga. Pada tahap ini kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan perkembangan telah terpenuhi. Namun belum dapat berpartisipasi maksimal terhadap masyarakat baik dalam bentuk sumbangan material, keuangan, ikut serta secara aktif dalam kegiatan sosial-kemasyarakatan, dan sebagainya.

5. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 indikator tahapan KS I, 8 indikator KS II, 5 indikator KS III, serta 2 indikator tahapan KS III Plus.³³ Tahap ini merupakan tahap dimana seluruh kebutuhan telah terpenuhi baik kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial psikologis, maupun yang bersifat perkembangan. Selain itu juga telah dapat memberikan sumbangan nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat atau pembangunan.

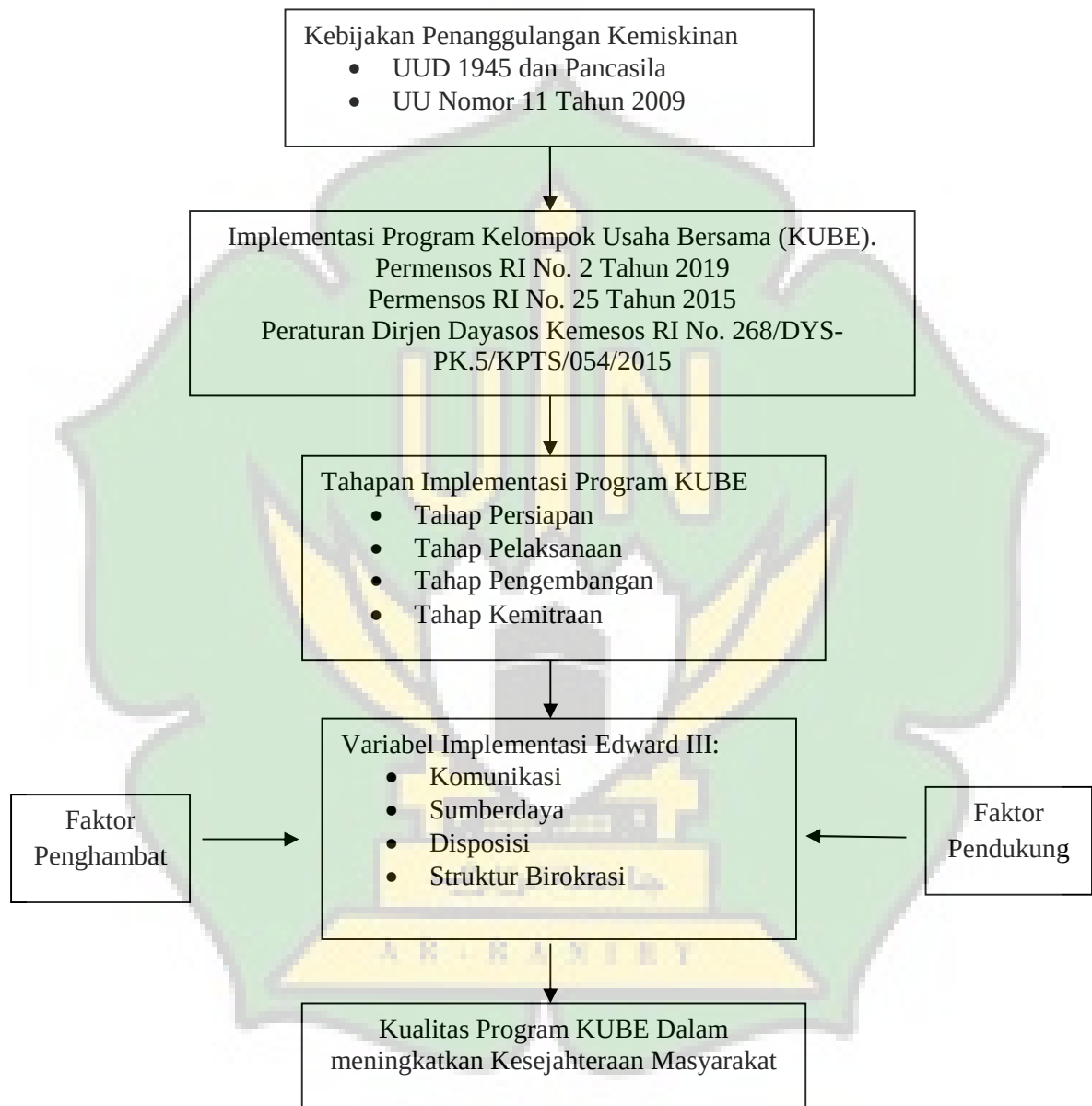
2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka teori implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program KUBE di Kabupaten Aceh Selatan, maka dijadikan sebuah alur hubungan-hubungan berbagai variabel dalam model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn.

Model skema kerangka berfikir penelitian ini mengacu pada tahapan implementasi program KUBE menurut Permensos Nomor 2 Tahun 2019, dan

³³Rosni, “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara” jurnal Geografi Vol. 9 No. 1, 2017, hlm. 58-59.

model Edward III Menggunakan 4 (empat) indikator implementasi kebijakan publik, digambarkan sebagai berikut



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan perhitungan.³⁴ Jenis penelitian adalah studi kasus dimana hasil dari penelitian bersifat analisis-deskriptif, yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati terkait implementasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Selatan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri atas 18 kecamatan dan 260 desa/kelurahan, dengan tujuan untuk memberikan deskripsi yang komprehensif tentang Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin secara menyeluruh.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi 2 yaitu :

1. Data Primer: Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh dari informan. Adapun yang menjadi key informannya adalah sebagai berikut:

³⁴ Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 2

No	Informan	Tugas dan Fungsi	Keterangan
1	Kepala Dinas Sosial, Kabupaten Aceh Selatan	Kewenangan menyusun rencana/program, merumuskan kebijakan, dan mengevaluasi hasil.	Kewenangan sebagai pelaksana program atau kebijakan yang telah direncanakan.
2	Kepala Bidang Kelembagaan & Pemberdayaan Fakir Miskin	kewenangan untuk mengkoordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial dalam pelaksanaan KUBE.	Bidang yang secara khusus menangani program KUBE.
3	Tenaga Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Berfungsi sebagai fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, peran teknis, dan sebagai peran pendamping.	Memiliki peran penting yang mempengaruhi kesuksesan KUBE.
4	Pengurus Kelompok Penerima Bantuan	Menjalankan KUBE sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.	Merupakan sasaran dari program KUBE, dan secara langsung merasakan dampak dari program tersebut.

Total jumlah informan adalah 12 (dua belas), yaitu tenaga pendamping KUBE 5 (lima) orang, Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan, dan anggota kelompok penerima bantuan KUBE berjumlah 5 (lima) orang.

2. Data sekunder: Data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, berupa catatan atau dokumentasi, buku, jurnal, artikel, majalah, dan lain sebagainya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan unsur terpenting dalam melakukan suatu penelitian. Teknik yang digunakan untuk menghimpun data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi dalam Kamus besar Bahasa Indonesia berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat. Sedangkan para ahli memberikan pemahaman observasi adalah sebagai berikut:

Nana Syauidih dalam Djama'an Satori mengatakan bahwa observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

Margono dalam Djama'an Satori mengungkapkan bahwa observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

Nasution dalam Djama'an Satori mengungkapkan bahwa observasi adalah semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Dari semua pendapat tersebut, terdapat satu kesamaan pemahaman bahwa observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.³⁵

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, akan tetapi apa yang tersembunyi jauh didalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, dan juga masa mendatang.³⁶

Menurut Lexy J. Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁷ Wawancara merupakan teknik untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan dari informan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang tidak tersedia secara tertulis.

³⁵Djama'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 104-105

³⁶Hamid Patilima, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 68.

³⁷Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 186.

3. Studi Dokumentasi

Menurut Renier dalam Djaman Satori membagi dokumen dalam tiga pengertian yaitu:³⁸

- d. Dalam arti luas meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan;
- e. Dalam arti sempit, yaitu yang meliputi semua sumber tertulis saja;
- f. Dalam arti spesifik, yaitu hanya meliputi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti surat perjanjian undang-undang, konsesi, hibah dan sebagainya.

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku, jurnal atau tulisan ilmiah seperti majalah, brosur dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan penulisan ini, serta sumber yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.³⁹

³⁸Djama'an Satori, *Ibid.*, hlm. 147

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 246.

Data reduction (reduksi data) berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas. Selanjutnya data display (penyajian data), dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan mudah dipahami.⁴⁰

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.⁴¹

⁴⁰ Sugiyono, *Ibid.*, hlm. 247-249.

⁴¹ Sugiyono, *Ibid.*, hlm. 252.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Tempat Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Selatan

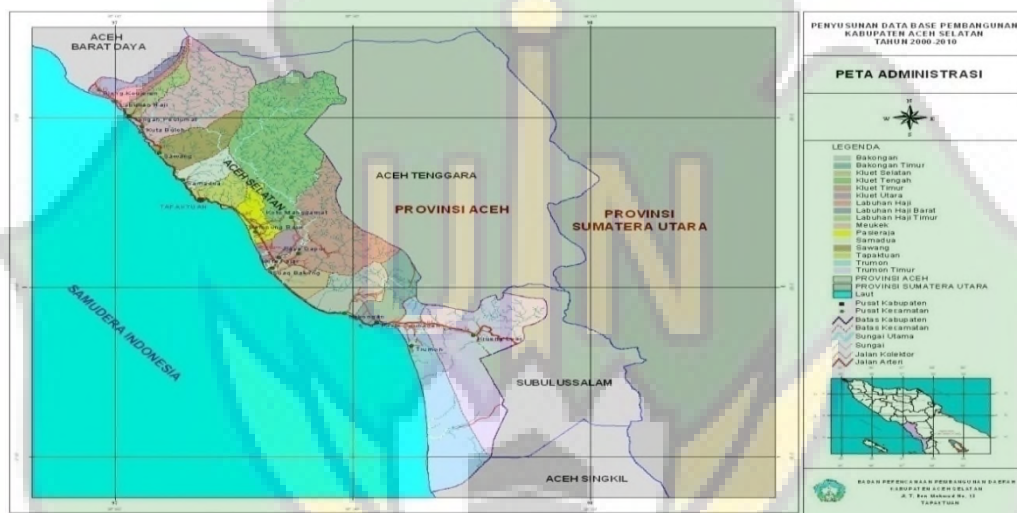
Wilayah Kabupaten Aceh Selatan terletak di pantai barat-selatan Provinsi Aceh yang berada di ujung utara Pulau Sumatera. Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 50.000, wilayah daratan Kabupaten Aceh. Kabupaten Aceh Selatan dengan ibukotanya Tapaktuan, merupakan salah satu daerah pesisir tertuan di Aceh. Kabupaten yang terbentuk berdasarkan UU No. 7 Tahun 1956, dalam sejarah pembentukannya telah dilakukan sejak tanggal 10 Oktober 1945. Kabupaten Aceh Selatan berada di wilayah pantai barat-selatan Aceh dan terletak antara 2°-4° Lintang Utara (LU) dan 96°-90° Bujur Timur (BT). Dari sisi letaknya, kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, di sebelah Utara. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil. Di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara.⁴²

Dengan kedudukan ini, memudahkan bagi Kabupaten Aceh Selatan melakukan aktivitas dan transaksi ekonomi dengan wilayah sekitarnya, seperti Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kabupaten Aceh Singkil. Kondisi ini tidak terlepas dari tersedianya sarana dan prasarana transportasi darat yang cukup memadai di wilayah pantai barat-selatan. Selain itu, Kabupaten Aceh Selatan juga menjadi salah satu pintu gerbang utama

⁴²Bappeda Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015, hlm. 1

menuju ke Kabupaten Simeulue, sehingga memberikan peluang yang cukup besar menjadi pemasok kebutuhan pangan ke Simeulue. Posisi strategis yang dimiliki Kabupaten Aceh Selatan juga membuka peluang dan memungkinkan transaksi perdagangan dengan daerah lainnya yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara.⁴³

Gambar. 1.2 Peta Administrasi Kabupaten Aceh Selatan



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018

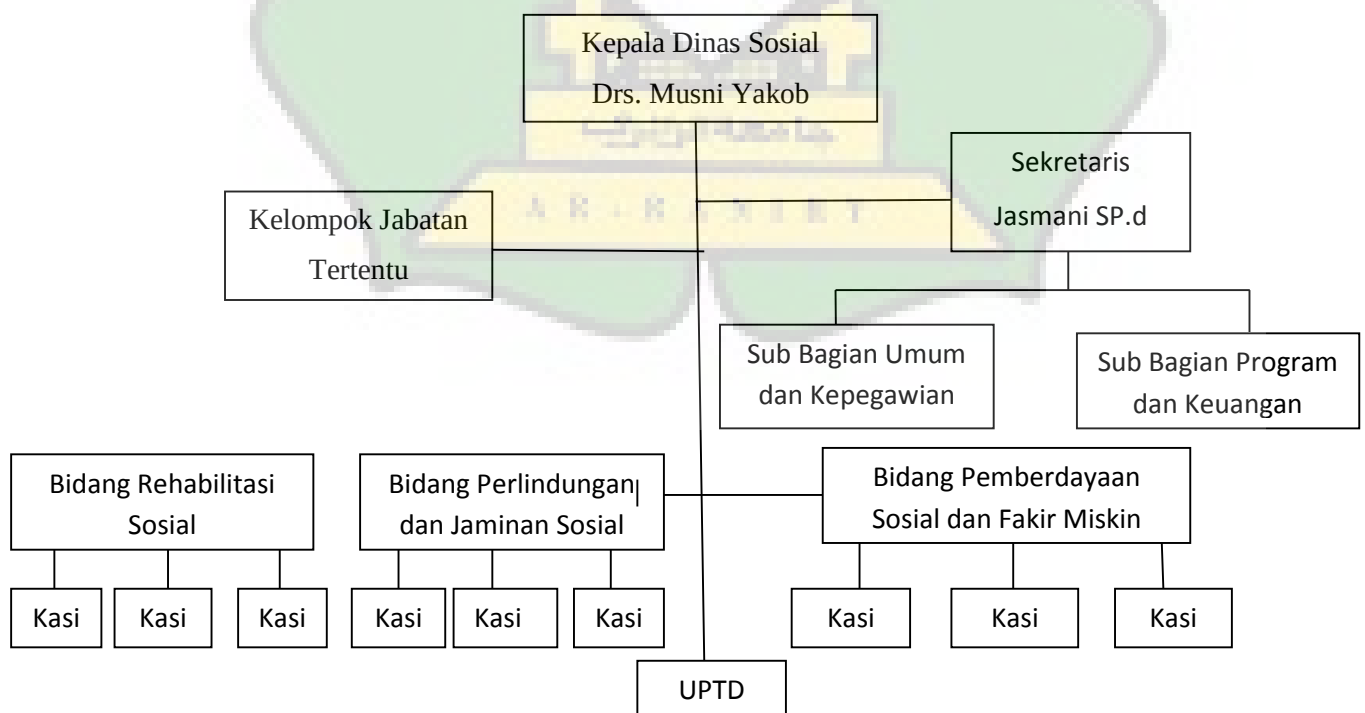
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan

Pelaksanaan pembangunan daerah tentunya setiap instansi harus memiliki visi dan misi yang jelas agar program yang dijalankan bisa memberi perubahan bagi masyarakat dan daerah itu sendiri. Adapun visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan, yaitu:

⁴³*Ibid.*, Bappeda Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015, hlm. 1

- a. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh sebuah organisasi. Visi dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan adalah terwujudnya masyarakat Aceh Selatan yang berkesejahteraan sosial tinggi.
- b. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari organisasi tersebut. Adapun misi dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan yaitu:
 1. Meningkatkan peran serta masyarakat PMKS dalam pembangunan Aceh Selatan.
 2. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat PMKS.
 3. Mempercepat proses tanggap darurat dan bantuan bencana.
 4. Meningkatkan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan prima bagi masyarakat Kabupaten Aceh Selatan.

4.1.3 Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019

Adapun tugas dan fungsi pokok Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan diantaranya:

1. Kepala Dinas Sosial, mempunyai tugas melakukan tugas umum tentang rehabilitasi pelayanan, bantuan sosial sesuai peraturan yang berlaku untuk mendukung tugas pokok Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Fungsi :
 - a. Pelaksana urusan ketatausahaan Dinas
 - b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
 - c. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemantauan serta valuasi dibidang kesejahteraan sosial
 - d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya
 - e. Pembinaan UPTD
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan serta ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Sosial. Fungsinya:
 - a. Pengelolaan administrasi keuangan
 - b. Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM), dan standar operasional prosedur (SOP)
 - c. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai tugas pelaksana teknis dibidang rehabilitasi sosial anak dan lansia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang.
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pelaksana teknis dibidang perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam, dan korban sosial keluarga.
5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin mempunyai tugas pelaksanaan dibidang yang berhubungan dengan pemberdayaan PMKS, dan penanganan fakir miskin.

Jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan adalah 78 orang baik di Dinas maupun yang di UPTD, terdiri dari 48 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 23 orang pegawai Honorer dan 27 orang Pegawai Kontrak. Jumlah pegawai tersebut terurai dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 1.2 Jumlah Tenaga Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan

No	Tempat Kerja	Jumlah Berdasarkan Jenis Pegawai			Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin		Ket
		PNS	Honorer	Kontrak	Laki-Laki	Perempuan	
1	Dinas Sosial	36	10	2	26	22	
2	UPTD. BLK	8	2	9	9	10	
3	UPT Pantiasuhan	4	1	15	15	6	
Total		48	13	26	50	28	

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019

Jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan formasi eselonering, diantaranya:

Tabel. 1.3 Jumlah Eselon Tenaga Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019

No	Jenis Eselon	Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Eselon II b	1	-	1
2	Eselon III a	-	1	1
3	Eselon III b	3	1	4
4	Eselon IV a	10	7	17
5	Eselon IV b	2	-	2
	Jumlah	16	9	25

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019

4.2.4 Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Aceh Selatan

KUBE (Kelompok Usaha Bersama) merupakan salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program KUBE ini merupakan program yang berperan untuk pemberdayaan masyarakat miskin melalui pengembangan usaha. Pelaksanaan KUBE Kabupaten Aceh Selatan mulai dari tahun 2005 hingga sampai sekarang. Peneliti membatasi focus penelitian hanya pada KUBE yang terbentuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

Kelompok KUBE Kabupaten Aceh Selatan melakukan berbagai macam jenis usaha. Secara umum jenis usaha yang dilakukan adalah pertanian/perkebunan, nelayan, kerajinan tangan, dan industri makanan. Hal ini senada dengan paparan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan, yaitu:

*Jenis usaha yang dikembangkan bervariasi, tergantung minat dari anggota kelompok ingin membuka usaha apa, dan kebanyakan jenis usaha adalah pertanian, nelayan, dan olahan makanan. Sebagai salah satu daerah yang dekat dengan pesisir dan hutan, rata-rata usahanya adalah pertanian dan nelayan.*⁴⁴

Berdasarkan peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin, pembentukan KUBE pasal 3 menerangkan bahwa:⁴⁵

1. KUBE dibentuk dengan kriteria:
 - a. mempunyai potensi, kemauan, dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
 - b. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah desa/kelurahan/nama lain dalam kecamatan yang sama; dan
 - c. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.
2. Jumlah anggota KUBE paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 20 (dua puluh) kepala keluarga.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan. Tanggal 8 Oktober 2019

⁴⁵ Kementrian sosial RI

3. Pengurus KUBE terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris
- c. bendahara; dan
- d. anggota

4. Pengurus KUBE dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota kelompok.

5. Pembentukan KUBE difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pembentukan KUBE tersebut sejalan dengan paparan Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin, yaitu:

*“KUBE dilaksanakan oleh masyarakat yang tergolong miskin, dan sudah terdata masuk dalam data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM). Masyarakat yang tergolong miskin tersebut diutamakan wanita, dan ada usaha yang sedang dijalankan”.*⁴⁶

Setelah kelompok KUBE ini terbentuk, langkah selanjutnya memberikan Bansos (bantuan sosial) berupa dana oleh pemerintah daerah sebagai modal untuk mengembangkan berbagai usaha yang dijalankan. Mengenai pendanaan untuk program KUBE mencakup beberapa sumber yang dijelaskan dalam peraturan menteri sosial pasal 18 yaitu:

- a. APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara);
- b. APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah);
- c. Dana hibah dalam negeri; dan/atau

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin. Tanggal 9 Oktober 2019.

d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pada setiap kelompok akan diberikan pendamping KUBE satu orang di setiap kecamatannya. Pendamping dalam hal ini berperan penting untuk memberikan pemahaman kepada kelompok terkait tujuan program KUBE, dimana tujuan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Peraturan menteri sosial nomor 2 tahun 2019, pasal 9 pendamping KUBE mempunyai tugas membantu:

- a. membentuk KUBE;
- b. memverifikasi calon penerima bantuan;
- c. menyiapkan calon penerima bantuan;
- d. menyiapkan rencana anggaran biaya;
- e. memberikan bimbingan teknis kepada KUBE;
- f. memberikan bimbingan motivasi sosial;
- g. mendampingi pelaksanaan UEP yang dilaksanakan oleh KUBE;
- h. memantau pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- i. membantu dalam penyusunan laporan kegiatan.

Pendamping sebagai pihak yang mengawasi pelaksanaan KUBE di setiap kecamatan, berbagai keluhan atau hambatan yang di temui oleh anggota akan disampaikan kepada pendamping. Selanjutnya pendamping akan mengkoordinasikannya dengan pihak lain yang juga berperan penting dalam implementasi program KUBE.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Aceh Selatan

Pelaksanaan program KUBE di Kabupaten Aceh Selatan mengikuti tahapan yang ditetapkan dalam Kemensos RI, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, pengembangan, dan tahap kemitraan. Proses implementasi program KUBE di paparkan oleh Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin:

Proses pelaksanaan program KUBE, hal yang pertama dilakukan adalah harus adanya kesiapan dalam perencanaan, tujuannya agar bisa terlaksana. setelah adanya kesiapan baru ke tahap pelaksanaan yaitu melaksanakan program KUBE tersebut yang bertujuan untuk masyarakat miskin, sehingga program tersebut tidak hanya terencana, tetapi juga dilaksanakan/diimplementasikan. Setelah tahap pelaksanaan selanjutnya tahap pengembangan, dimana setelah program ini dilaksanakan perlu dilakukan pengembangan lagi, tidak hanya dilaksanakan begitu saja tanpa ada pengembangan. Kemudian tahap terakhir adalah kemitraan, tahap ini merupakan tahap melakukan kerjasama dengan berbagai dinas terkait untuk mendukung kesuksesan program KUBE kita ini. Nah seperti itulah alur pelaksanaan program KUBE.⁴⁷

Dari hasil paparan Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir miskin tersebut dapat dilihat bahwa proses pelaksanaan program KUBE sudah mengikuti mekanisme dan prosedur yang berlaku secara umum.

Pelaksanaan program KUBE ini tidak lepas dari berbagai persoalan yang ada di lapangan. Dalam artian tidak semua KUBE bisa mencapai semua tahap ini secara penuh, misalnya satu KUBE mencapai tahap pelaksanaan dan pengembangan secara baik, namun KUBE lain hanya sampai pada tahap pelaksanaan saja dan kemudian tidak aktif lagi atau bubar.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin. Tanggal 9 Oktober 2019

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini meliputi tahap perencanaan program, penyuluhan sosial, dan bimbingan motivasi. Tahap ini masyarakat anggota KUBE dikenalkan dengan permasalahan yang akan mereka hadapi, sehingga mereka dapat mencari solusi secara bersama-sama. Tahap ini merupakan tugas dari pendamping KUBE, dimana pendamping memberi motivasi dan pemahaman tentang KUBE. Kemudian setelah diberikan motivasi kepada kelompok untuk membentuk KUBE, selanjutnya akan diusul sebagai calon penerima bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari pemerintah. Berikut ini penyampaian dari Kabid kelembagaan dan pemberdayaan fakir miskin:

*KUBE yang sudah terbentuk mereka akan membuat proposal untuk permohonan bantuan. Kemudian proposal itu akan kami observasi untuk melihat kebenarannya apakah anggota kelompok benar-benar dalam melaksanakan kegiatan KUBE. Selanjutnya akan diidentifikasi mengenai kriteria penerima bantuan apakah sudah sesuai atau tidak, jika sudah diperiksa semuanya maka akan diputuskan KUBE yang layak untuk mendapatkan bantuan.*⁴⁸

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan, berikut paparan dari beliau:

*“setelah semua usulan tersebut masuk, kami akan periksa kelengkapannya kemudian akan ada tim yang datang untuk memverifikasi kelengkapan tersebut, tujuannya untuk melihat keseuaian fakta di lapangan apakah sudah benar atau hanya memanipulasi data”.*⁴⁹

Selanjutnya penetapan sasaran program KUBE, dimana penetapan ini harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah diatur dalam Permensos RI No. 2 Tahun 2019. Keluarga miskin yang menjadi sasaran dari program ini adalah keluarga

⁴⁸Hasil wawancara dengan Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin. Tanggal 10 Oktober 2019

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan. Tanggal 10 Oktober 2019

yang telah terdaftar masuk dalam BDT (Basis Data Terpadu). Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin, yaitu:

*“KUBE dilaksanakan oleh masyarakat yang tergolong miskin, dan sudah terdata masuk dalam data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM). Masyarakat yang tergolong miskin tersebut diutamakan wanita, dan ada usaha yang sedang dijalankan”.*⁵⁰

Selanjutnya juga disampaikan oleh Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin:

*“Masyarakat yang menerima manfaat bantuan sosial ini adalah mereka yang masuk dalam basis data terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh pusat data dan informasi Kementerian Sosial, oleh karena itu penerima manfaat harus dibekali pemahaman yang benar terkait tujuan KUBE agar tidak disalahgunakan. Karena tujuan diberikan bantuan ini agar dapat meningkatkan taraf ekonomi kelompok, sehingga mampu bangkit dari kemiskinan”.*⁵¹

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini merupakan tahap melakukan rekrutmen pendamping, sosialisasi dan bimbingan pemberian bantuan permodalan KUBE. Pendamping memiliki peran penting dalam keberlangsungan KUBE, dimana hal ini akan berpengaruh terhadap KUBE yang didampinginya.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan:

*“Peran pendamping sangat menentukan keberhasilan KUBE, jika pendamping tidak aktif dalam mendampingi maka anggota kelompok akan merasa diabaikan, tentunya hal ini akan menurunkan semangat mereka dalam berusaha. Lemahnya semangat dari anggota kelompok maka akan melemahkan pelaksanaan KUBE itu sendiri”.*⁵²

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin. Tanggal 9 Oktober 2019.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan. Tanggal 9 Oktober 2019

⁵² Hasil wawancara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan. Tanggal 9 Oktober 2019.

Kemudian pada tahap ini dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis, dimana bimbingan teknis ini berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sosial, penataan kelembagaan, dan pengelolaan usaha ekonomi KUBE. Hal ini merupakan pembekalan bagi anggota kelompok tentang hakekat KUBE, pemilihan jenis usaha, cara mengelola KUBE, pengendalian kualitas produk, serta menjalin kemitraan. Bimbingan teknis harus melibatkan *stakeholder* yang berperan dalam pembinaan KUBE, diantaranya seperti UMKM, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan Dinas lainnya yang berkaitan dengan jenis usaha.

Pendamping sebagai pihak yang mengawasi pelaksanaan KUBE disetiap kecamatan, berbagai keluhan atau hambatan yang di temui oleh anggota akan disampaikan kepada pendamping. Selanjutnya pendamping akan mengkoordinasikannya dengan pihak lain yang juga berperan penting dalam implementasi program KUBE. Berikut ini hasil wawancara dengan pendamping KUBE yang ada di Kecamatan Bakongan Timur:

*“Saya selaku pendamping ditugaskan untuk selalu mengontrol usah-usaha yang dijalankan oleh kelompok, baik itu usaha peternakan, pertanian, perikanan, dagang, dan lain sebagainya, tujuannya untuk melihat apakah kelompok tersebut benar-benar mematuhi aturan KUBE atau tidak, karena hasil dari usaha tersebut untuk mereka juga. Selain itu kami juga memberikan sosialisasi kepada kelompok melalui pertemuan yang diadakan selama seminggu sekali”.*⁵³

Selanjutnya juga disampaikan oleh pendamping KUBE yang ada di Kecamatan Trumon:

⁵³Hasil wawancara dengan pendamping KUBE kecamatan Bakongan Timur. Tanggal 17 Oktober 2019.

*“Selama pertemuan berlangsung saya menyampaikan tentang apa itu KUBE, tujuan KUBE, dan bagaimana cara mengelola KUBE. Jadi sebelum bantuan diberikan mereka sudah paham tanggungjawab dalam berkerjasama, dan sudah tahu resiko yang akan dihadapi”.*⁵⁴

Tahap ini yang menjadi pokok pelaksanaannya adalah pemberian bantuan sebagai modal bagi setiap kelompok KUBE yang sudah terbentuk. Jumlah anggota KUBE paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 20 (dua puluh) kepala keluarga, dan untuk jumlah dana bantuan KUBE mendapatkan Rp. 20.000,000 (dua puluh juta rupiah) per kelompok melalui transfer ke rekening kelompok. Hal tersebut sejalan dengan paparan dari Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin, yaitu:

*“KUBE yang sudah terbentuk diberikan dana senilai 20 juta per kelompok secara cash transfer, dan dana tersebut hanya diberikan sekali saja, anggaran ini tidak diberikan secara terus menerus, karena hanya ada sekali pemberian saja. oleh karena itu kepada anggota KUBE untuk bisa memanfaatkan dana sebaik mungkin”.*⁵⁵

Mengenai kecukupan dana yang diberikan dijelaskan oleh pendamping KUBE yang di kecamatan Tapaktuan:

*“Menurut saya jumlah dana segitu sudah cukup untuk mengembangkan usaha, karena jumlahnya tidak terbilang terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar, apalagi mengingat dana tersebut merupakan dana bantuan dari pemerintah. Hal yang terpenting adalah bisa dikelola secara baik, mengikuti aturan KUBE, dan harus punya komitmen”.*⁵⁶

Pengelolaan KUBE ini dilakukan secara kelompok, namun dilakukan penyesuaian dengan memberi pilihan kepada anggota untuk mengelola Usaha

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Pendamping KUBE Kecamatan Trumon. Tanggal 12 Oktober 2019.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin. Tanggal 9 Oktober 2019

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Pendamping KUBE Kecamatan Trumon. Tanggal 14 Oktober 2019.

Ekonomi Produktif (UEP) secara perorangan, tetapi masih tetap dalam ikatan kelompok. Hal tersebut tentunya memiliki kelemahan dan kekuatan. Berikut ini penjelasan disampaikan oleh pendamping KUBE Kecamatan Bakongan:

“Pelaksanaan KUBE ini ada 2 (dua) macam, pertama ada 1 usaha yang dikembangkan secara bersama, dan kedua masing-masing anggota memiliki usaha sendiri namun masih dalam kelompok. Usaha yang dikembangkan secara bersama ini akan menimbulkan sifat kesetiakawanan sosial mereka agak susah karena tergantung pada bagi hasil rajin atau tidaknya dalam bekerja, sehingga akan menimbulkan keceburuan sosial. Namun dari segi usahanya berjalan bagus, menurut saya hanya itu saja”.⁵⁷

3. Tahap Pengembangan

Tahap ini merupakan tahap pengembangan usaha, sehingga tidak jalan diempat. Perkembangan usaha ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat miskin anggota KUBE. Kondisi perkembangan KUBE di Kabupaten Aceh Selatan berikut penjelasan yang disampaikan oleh Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin:

“Melihat perkembangan KUBE yang selama ini dijalankan sudah ada kemajuan jika dibandingkan dengan awal-awal KUBE ini terbentuk. Kemajuannya bisa dilihat dari segi sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Dari segi ekonomi dapat menambahkan pendapatan, dari segi sosial bisa merekrut anggota lainnya yang ingin bergabung dan membantu mereka mendapatkan bantuan, dan mau mengikuti aturan KUBE. Selanjutnya dari segi kelembagaan terbentuknya bidang-bidang baru seperti bagian pemasaran, periklanan, dan lain sebagainya, tidak hanya berfokus pada ketua, sekretaris dan bendahara saja, semuanya akan terlibat”.⁵⁸

Dalam proses pengembangan usaha banyak hal yang perlu dilakukan, diantaranya yaitu seperti melakukan promosi produk dan memperluas pemasaran

⁵⁷Hasil wawancara dengan Pendamping KUBE Kecamatan Bakongan. Tanggal 8 Oktober 2019.

⁵⁸Hasil wawancara dengan Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin. Tanggal 10 Oktober 2019.

agar dapat dikenal oleh masyarakat. Berikut ini penjelasan yang disampaikan oleh

Pendamping Kecamatan Meukek:

*“Sudah ada beberapa KUBE yang produknya masuk dalam pasaran, yaitu produk olahan makanan jenis Pala. Produk tersebut sudah dijual di swalayan-swalayan terdekat dan juga sudah tembus diluar Kabupaten Aceh Selatan ini sendiri, sedangkan produk KUBE lainnya masih ditingkat Kabupaten untuk proses penjualan yaitu berupa produk kerajinan tangan.”*⁵⁹

Terkait hal ini juga disampaikan oleh Pendamping KUBE di Kecamatan Tapaktuan, bagaimana sistem pemasaran yang dilakukan oleh anggota KUBE, yaitu:

*“Untuk pemasaran produk usaha yang telah dikembangkan, hal pertama yang kami lakukan adalah mengenal target pasar, setelah itu memilih tempat yang strategis dimana pembeli mudah ditemui dan tingkat penjualannya tinggi, kemudian menciptakan produk yang berkualitas karena akan membantu proses pemasaran itu sendiri, selain itu hal yang terpenting lainnya adalah harus memanfaatkan media sosial”.*⁶⁰

Hal lainnya mengenai pengembangan usaha disampaikan oleh Pendamping KUBE Kecamatan Sawang:

*“Saya melakukan penambahan produk yang bervariasi, sehingga konsumen akan lebih tertarik dengan varian rasa yang berbeda-beda, sehingga tidak menimbulkan kejenuhan untuk mengonsumsi olahan makanan kita”.*⁶¹

Pendamping KUBE lainnya juga memberikan tanggapan:

“iya, kami melakukan penjualan produk ke warung-warung biasa yang ada didekat gampong dan ada juga yang menjual secara online, selain itu kami juga memanfaatkan tempat wisata untuk meningkatkan perkembangan usaha, untuk pembelian umumnya masih banyak dari dalam gampong sih..”

⁵⁹Hasil wawancara dengan Pendamping KUBE Kecamatan Meukek. Tanggal 10 Oktober 2019.

⁶⁰Hasil wawancara dengan Pendamping KUBE Kecamatan Tapaktuan di Dinas Sosial Kabupatn Aceh Selatan. Tanggal 12 Oktober 2019

⁶¹Hasil wawancara dengan Pendamping KUBE Kecamatan Sawang. Tanggal 23 Oktober 2019.

4. Tahap Kemitraan

Tahap ini merupakan tahap menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait. Pada tahap ini KUBE telah mampu menciptakan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Dari sekian banyak KUBE yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, tidak semua KUBE mampu mencapai tahap ini, dari 110 KUBE hanya sekitar 15-20% yang sudah mencapai tahap kemitraan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin.

Dalam menjalin kemitraan KUBE harus mampu memberikan keuntungan kepada pihak mitranya, harus bisa menjalin komunikasi yang baik, dan bersikap jujur. Sehingga akan menimbulkan hubungan yang baik dan akan memperoleh keuntungan dari pola hubungan tersebut. Adapun kesulitan dalam menjalin kemitraan disampaikan oleh seorang pendamping Kecamatan Kluet Utara:

“Hal ini memang agak sulit dicapai oleh anggota kelompok pada umumnya dari awal KUBE terbentuk hingga sampai sekarang. Seperti usaha pertanian dimana hasil panen hanya dijual di pasar-pasar saja, karena sulit menemukan agen lainnya untuk penjualan. Hal ini juga sama dengan jenis usaha lainnya. Memang sudah ada yang berjalan tapi menurut saya masih belum maksimal”.⁶²

4.2.2 Indikator Keberhasilan KUBE

Program KUBE sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan ada indikator yang menjadi tolak ukur untuk melihat perubahan yang terjadi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pelaksanaan program KUBE ini ada 3 (tiga) aspek perubahan yang ingin dicapai, yaitu aspek ekonomi, aspek kelembagaan, dan aspek sosial. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa ada

⁶²Hasil wawancara dengan Pendamping KUBE Kecamatan Kluet Utara. Tanggal 26 Oktober 2019.

beberapa variabel yang ditetapkan untuk melihat keberhasilan pelaksanaan program KUBE yaitu:

1. Meningkatnya pendapatan keluarga miskin (anggota KUBE).
2. Meningkatnya kemandirian usaha sosial ekonomi keluarga miskin.
3. Meningkatnya aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan sosial dasar dan fasilitas pelayanan publik.
4. Meningkatnya kepedulian dan tanggung jawab sosial anggota KUBE di dalam masyarakat.
5. Meningkatnya ketahanan sosial di dalam anggota KUBE dalam mencegah masalah-masalah sosial dan kemiskinan.

Beberapa indikator diatas keberhasilan pelaksanaan program KUBE di Kabupaten Aceh Selatan, berikut paparan yang disampaikan oleh Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin:

“Dari beberapa jumlah KUBE yang terbentuk tahun 2015, 2017 hanya ada 20 KUBE yang berhasil. Tentunya KUBE yang berhasil ini memberikan dampak yang positif terhadap anggota kelompok, yaitu bisa meningkatkan pendapat mereka dan juga akan meningkatkan kesejahteraan hidupnya”.⁶³

Selanjutnya pendamping KUBE yang lain juga memberi tanggapan,

Pendamping KUBE Kecamatan Pasie Raja :

“Untuk KUBE yang aktif kesejahteraan masyarakat bisa dikatakan sudah mulai meningkat walaupun belum secara keseluruhan, karena semua itu butuh proses, tapi intinya KUBE yang aktif ini secara perlahan sudah berdampak, mengingat jumlah bantuan sebesar 20 juta tidak mungkin usaha langsung ke tahap yang tinggi”.⁶⁴

⁶³Hasil wawancara dengan Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin. Tanggal 12 Oktober 2019.

⁶⁴Hasil wawancara dengan Pendamping Kube Kecamatan Pasie Raja. Tanggal 26 Oktober 2019.

Kemudian penjelasan lainnya juga disampaikan oleh salah satu anggota kelompok:

“Bagi kami KUBE ini merupakan nafkah utama untuk mendapatkan penghasilan. Tetapi bagi kaum bapak-bapak KUBE itu merupakan nafkah sampingan jadi tidak seratus persen mengharapkan penghasilan dari KUBE, karena jika mengharapkan penghasilan tersebut tidak akan memenuhi kebutuhan, apalagi kebutuhan kita berbeda-beda ya..”.

Hal lainnya juga disampaikan oleh Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin:

“Program KUBE ini lebih diutamakan bagi ibu-ibu, sehingga tidak heran jika usaha ini merupakan pekerjaan yang utama bukan sampingan. Dari jumlah KUBE yang ada 70 persennya adalah ibu-ibu rumah tangga dan selebihnya adalah bapak-bapak”.

Program KUBE yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, berikut ini penjelasan disampaikan oleh salah satu anggota kelompok yaitu KUBE Zarda Taylor ibu Asnidar tentang capaian implementasi KUBE terhadap manfaat yang diarsakan:

*“manfaatnya dapat dirasakan dan sangat membantu, kami tidak lagi mengutang ketetangga untuk membeli kebutuhan pokok misalnya seperti beras, ya walaupun ada utangnya tidak sebanyak yang dulu lagi, selain itu juga bisa membantu kebutuhan lainnya seperti jajan anak ke sekolah. Kalau misalnya penghasilan banyak kami juga bisa menabung dek..”.*⁶⁵

Selanjutnya dari sisi kelembagaan KUBE disampaikan oleh salah satu anggota KUBE :

“Sebuah organisasi tentunya ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Tapi kurang berjalan karena jika ada pertemuan susah untuk diajak ngumpul, karena ada kesibukan tersendiri, ada yang kerja, sibuk dengan kerjaan rumah, dan kadang ada juga yang malas untuk ikut pertemuan”.

⁶⁵Hasil wawancara dengan Ibu Asnidar KUBE Zarda Taylor. Taanggal 11 Oktober 2019.

Mengenai tentang capaian program KUBE terhadap manfaat yang dirasakan oleh anggota kelompok juga disampaikan oleh ketua KUBE...

“Kalau menurut saya program ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, karena program ini sudah direncanakan dan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu anggota KUBE yang harus bisa mengembangkan usahanya secara komitmen agar dapat terasa manfaatnya”.

Melihat dari aspek sosial apakah mengalami peningkatan atau tidak, berikut disampaikan oleh pendamping KUBE Kecamatan:

“Program KUBE ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah, baik ditingkat kecamatan maupun ditingkat gampong dan tidak hanya itu masyarakat juga mendukung penuh program KUBE ini, seperti pak keuchik dan beberapa masyarakat juga sering mendatangi KUBE yang ada di kecamatan untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan usaha”.

Selain itu penjelasan lainnya juga disampaikan oleh salah seorang anggota KUBE Anggrek, ibu Nurhayati:

*“Kami sesama anggota aktif dalam berbagai kegiatan misalnya kegiatan yasinan, gotong royong, dan juga kompak dalam bekerja mengembangkan usaha. Kalau misalnya ada keluarga yang tidak mampu dan meminta bantuan kami akan membantu, dan jika penghasilan yang kami dapatkan lumayan banyak maka akan kami sumbangkan ke masyarakat yang mengalami disabilitas. Kalau misalnya ada satu atau dua orang yang tidak hadir itu tidak masalah, yang penting masih selalu kompak”.*⁶⁶

Dari hasil wawancara mengenai indikator keberhasilan KUBE, dapat dilihat bahwa dari aspek ekonomi dapat meningkatkan pendapatan walaupun masih sebatas penghasilan tambahan. Selanjutnya dari aspek sosial sudah terjalin kerjasama yang baik, tumbuhnya rasa kepedulian sosial yang tinggi, dan partisipasi juga tinggi baik dari pemerintah maupun masyarakat setempat juga ikut mendukung penuh. Kemudian yang terakhir adalah aspek kelembagaan, bagi

⁶⁶Hasil wawancara dengan ibu Nurhayati KUBE Anggrek. Tanggal 15 Oktober 2019.

KUBE yang aktif mereka akan selalu kompak hadir jika ada pertemuan, tugas dan fungsi juga berjalan baik. Selain itu kegiatan kelembagaan ini juga melihat kelengkapan dan pencatatan buku kas, buku simpan pinjam kelompok, daftar hadir pertemuan KUBE, dan catatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan KUBE.

4.2.3 Hambatan Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kabupaten Aceh Selatan

Secara umum permasalahan yang terdapat dalam proses implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Aceh Selatan, berdasarkan penemuan awal peneliti yaitu tidak semua pendamping melakukan pendampingan dengan baik sehingga mempengaruhi kinerja KUBE, keterbatasan jumlah pendamping, proses sosialisasi dan bimbingan teknis tidak dilakukan secara mendalam sehingga pemahaman tentang program KUBE tidak sama.

Mengenai hal tersebut akan dilihat berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III yaitu ada 4 faktor yang mempengaruhi kesuksesan sebuah implementasi, yaitu proses komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Faktor pendukung dan penghambat proses komunikasi

Pelaksanaan program KUBE tidak akan terwujud tanpa adanya komunikasi yang baik, oleh karen itu pentingnya peran komunikasi sebagai media dalam penyampaian informasi program. Mengenai informasi menyangkut program KUBE ini harus dikomunikasikan kepada implementor, masyarakat

penerima bantuan, dan juga kepada stakeholder. Penyampaian informasi harus jelas agar program KUBE dapat terlaksana secara baik. Penyampaian informasi yang diberikan kepada penerima bantuan KUBE yaitu melalui pertemuan KUBE, bimbingan teknis, dan juga sosialisasi.

Proses sosialisasi yang diberikan dengan cara berjenjang dari atas ke bawah, yaitu dari pemerintah Pusat ke Kabupaten, kemudian dari Kabupaten ke pendamping yang ada di setiap kecamatannya, dan selanjutnya sampai kepada masyarakat penerima bantuan KUBE. Berikut disampaikan oleh Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin:

*“Dalam hal ini pemerintah daerah yaitu Dinas Sosial memfasilitasi atau memberikan untuk melakukan bimbingan teknis terhadap pengurus KUBE, namun dana tersebut tidak banyak hanya cukup untuk melakukan bimbingan teknis saja”.*⁶⁷

Selanjutnya beliau juga menegaskan bahwa proses komunikasi dilakukan dari bawah yaitu kepada kelompok penerima bantuan yang disampaikan oleh pendamping KUBE.

“Kita memiliki 35 pendamping KUBE, dimana setiap kecamatannya itu di dampingi oleh satu orang pendamping. Dari pihak kami Dinas Sosial juga melakukan pertemuan dengan pendamping yaitu selama sebulan sekali. Setelah kami memberika informasi kepada para pendamping kemudian mereka akan mempersiapkan diri untuk melaksanakan program KUBE ini”.

Selanjutnya juga disampaikan oleh pendamping KUBE yang di Kecamatan Bakongan Timur:

“Saya selaku pendamping tidak membatasi anggota kelompok dalam berkomunikasi, ya misalnya saya tidak bisa hadir dalam pertemuan itu mereka

⁶⁷Hasil wawancara dengan Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin. Tanggal 14 Oktober 2019.

*dapat berkomunikasi melalui media sosial, ataupun misalnya jumpa di jalan juga bisa kita melakukan komunikasi”.*⁶⁸

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat peneliti simpulkan bahwa proses implementasi program KUBE di Kabupaten Aceh Selatan sudah berjalan baik, dilihat dari alur penyampaian informasi mulai dari Pusat ke Kabupaten, kemudian ke pendamping, dan selanjutnya ke masyarakat penerima bantuan KUBE. Selain itu komunikasi juga berlangsung secara rutin melalui rapat yang diadakan oleh Dinas Sosial, dan pertemuan yang diadakan oleh pendamping dengan anggota kelompok. Setiap rapat yang diadakan oleh Pihak Dinas Sosial menyangkut pelaksanaan KUBE berbagai masalah yang ditemui oleh pendamping maka akan di bahas dan dicari solusinya secara bersama-sama. Selain itu pertemuan yang diadakan oleh pendamping selama seminggu sekali juga akan membantu anggota kelompok menyampaikan berbagai keluhan yang dialami baik yang berkaitan dengan usaha, kelembagaan, maupun sosial.

Melihat faktor penghambat komunikasi yaitu keterbatasan dana dalam melakukan sosialisasi, sehingga tidak semua anggota KUBE dapat ikut serta. Mereka hanya diwakili saja, selain itu bimbingan teknis yang lakukan dalam jangka waktu yang singkat tidak akan memberi pemahaman yang detail kepada anggota KUBE Oleh karena itu kepada pendamping agar dapat memberi pemahaman yang lebih dalam lagi kepada anggota KUBE terhadap informasi yang dirasa masih kurang agar pelaksanaan program ini bisa berjalan lancar.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Pendamping KUBE Kecamatan Bakongan Timur. Tanggal 2 Oktober 2019.

2. Faktor pendukung dan penghambat proses sumberdaya

Sumberdaya merupakan komponen yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap individu, karena sumberdaya dalam hal ini akan mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan/program. sumberdaya kebijakan meliputi staf, wewenang, informasi, dan fasilitas. Untuk kelancaran pelaksanaan program KUBE maka disediakan 35 pendamping, yang ditugaskan di setiap kecamatannya satu orang tenaga pendamping. Berikut ini disampaikan oleh Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin:

“Menurut saya untuk jumlah pendamping sebanyak 35 orang itu sudah cukup memadai, setiap pendamping akan ditetapkan berdasarkan daerah asalnya, misalnya pendamping tinggal di kecamatan Bakongan Timur, maka dia akan menjadi pendamping KUBE yang ada di daerah tersebut”.⁶⁹

Selanjutnya mengenai kinerja pendamping juga disampaikan oleh Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin:

“Sebenarnya kinerja pendamping ada banyak hal yang membuat kita tidak puas, tetapi kami juga tidak bisa mengambil sikap tegas karena ada hal lain yang perlu dipertimbangkan. Apalagi pendamping KUBE ini merupakan relawan sosial kita, mereka juga ikut membantu kegiatan lainnya apabila kami meminta bantuan diluar pelaksanaan KUBE”.

Mengenai rekrutmen tenaga pendamping KUBE ditetapkan beberapa kriteria, berikut penjelasannya disampaikan oleh Kasi Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin ibu Ros:

“Yang menjadi kriteria pendamping pertama usia ditetapkan antara 25-45 tahun, memiliki keahlian dalam mendampingi, berperan aktif dalam bermasyarakat, dan memiliki jiwa kewirausahaan. Karena mengingat program KUBE ini merupakan program pengembangan usaha, selain itu juga

⁶⁹Hasil wawancara dengan Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin. Tanggal 14 Oktober 2019.

mempunyai jiwa sosial yang tinggi agar bisa membimbing anggota kelompok dengan sabar.”⁷⁰

Ketersediaan jumlah pendamping sebanyak 35 orang jika dilihat secara mendalam, tidak semua pendamping dapat bekerja sebagaimana mestinya. Hal ini disampaikan oleh Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin:

“pendamping yang aktif dalam rapat secara persentase hanya berkisar 40% selebihnya kurang aktif dalam mendampingi KUBE. Hal ini disebabkan setiap kami meminta nama pendamping untuk melakukan kegiatan atau hal lainnya selalu melewati kecamatan. Dari sinilah memunculkan nama-nama pendamping yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah kami tetapkan. Sehingga pendamping tersebut tidak bisa bertugas secara maksimal.”

Pendamping yang bertugas mendampingi KUBE sangat bervariasi, ada yang mendampingi 8 KUBE, 6 KUBE, dan ada juga yang 12 KUBE. Keaktifan dalam mendampingi dipengarungi oleh pendamping itu sendiri, ada KUBE yang di dampingi sebanyak 12 KUBE bisa berjalan baik, namun ada juga yang mendampingi 6 KUBE tetapi proses pendampingan tidak aktif.

Rendahnya kinerja pendamping berkaitan dengan ketersediaan fasilitas yang mendukung proses pendampingan dilapangan. Berikut penjelasan disampaikan oleh pendamping KUBE Kecamatan Trumon:

“Sebenarnya jika dilihat pendapatan kami untuk tugas pendampingan ini memang belum mencukupi, contohnya saja untuk menghadiri rapat yang diadakan di Dinas Sosial kami harus menempuh jarak yang lumayan jauh apalagi dengan kendaraan bermotor juga mengeluarkan biaya yang lumayan”.⁷¹

Dari beberapa penjelasan yang disampaikan tersebut, adapun yang menjadi faktor pendukung sumber pelaksana program KUBE yaitu tersedianya tenaga pendamping sebanyak 35 orang untuk 200 KUBE yang ada di Kabupaten

⁷⁰Hasil wawancara dengan Kasi Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin. Tanggal 16 Oktober 2019.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Pendamping Kecamatan Trumon. Tanggal 21 Oktober 2019.

Aceh Selatan. Selanjutnya faktor yang menjadi penghambat diantaranya pembagian tugas pendamping berdasarkan kecamatan membuat jumlah KUBE dampingan tidak sama, ada yang mendapatkan jumlah dampingan KUBE banyak dan ada juga yang sedikit. Selain itu pendamping yang aktif dalam mendampingi KUBE hanya 40% dari 35 jumlah pendamping.

3. Faktor pendukung dan penghambat proses disposisi

Disposisi merupakan hal yang berkaitan dengan sikap implementor. Jika implementor memiliki sifat yang positif maka pelaksanaan program akan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Implementasi program KUBE di Kabupaten Aceh Selatan, bagian teknis Dibnas Sosial memiliki sikap yang positif terhadap program KUBE sebagai program unggul dalam menanggulangi kemiskinan. Hal ini disampaikan oleh Kasi Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin, ibu Ros:

“Program KUBE ini merupakan program unggulan Kementerian Sosial RI dalam mengentaskan kemiskinan tentunya sudah dikaji secara mendalam, jadi saya yakin program ini bisa mensejahterakan keluarga miskin. Dari awal persiapan KUBE itu benar-benar kita matangkan baik dari diri kami sendiri, tenaga pendamping,, maupun anggota kelompok KUBE ini sendiri”.⁷²

Implementasi program KUBE ini diupayakan agar berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Segala macam penyimpangan baik berupa sikap penerima bantuan, penyalahgunaan dana dan hal lainnya dapat dieliminir. Berikut penjelasan disampaikan oleh Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin:

⁷² Hasil wawancara dengan Kasi Kelmbagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin. Tanggal 14 Oktober 2019.

“Penyaluran dana sudah disalurkan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan Kemensos, yaitu melalui cash transfer ke rekening kelompok. Dana yang dicairkan tersebut harus mengikuti rekomendasi dari Dinas, kemudian akan di kontrol oleh pendamping sebagai pihak yang mengawasi, penyaluran dana ini dilakukan secara bertahap guna untuk memudahkan kami melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi.”⁷³

Kemudian untuk melihat sikap implementor bagian teknis yaitu pendamping KUBE, maka berikut penjelasan disampaikan oleh Muqaddam Pendamping KUBE yang di Kecamatan Tapaktuan:

“Selama saya bertugas mendampingi anggota KUBE, saya bangga jika ada KUBE yang sudah bisa mengembangkan usahanya, terutama dari ibu-ibu yang sangat giat bekerja hal ini menimbulkan rasa kesenangan tersendiri bagi saya, karena saya tau mengembangkan usaha tidaklah mudah perlu adanya kesabaran dan niat yang tulus”.⁷⁴

Pemahaman yang mendalam terhadap pelaksanaan program KUBE menjadikan mereka bersungguh-sungguh dalam menjalankan program KUBE ini sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan. Sikap positif dari implementor baik itu Dinas Sosial maupun tenaga pendamping merupakan salah satu cara yang digunakan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan KUBE, walaupun respon yang diterima tidak sesuai pengharapan.

Selain itu hal lainnya yang mendukung kondisi yang digambarkan oleh implemenntor disampaikan oleh salah seorang anggota KUBE :

“Kalau ada pertemun jika pendamping tidak dapat hadir maka akan diberitahukan kepada kami, tapi selama ini selalu hadir sih.., Jadi kalau misalnya ada kendala yang kami temui dan tidak bisa mengatakannya secara langsung”⁷⁵,

⁷³Hasil wawancara dengan Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin. Tanggal 10 Oktober 2019.

⁷⁴Hasil wawancara dengan Pendamping KUBE Kecamatan Tapaktuan. Tanggal 21 Oktober 2019.

*kami bisa menelpon beliau untuk menanyakan solusinya bagaimana, sejauh ini pendamping kami sangat aktif dalam memberi pembinaan”.*⁷⁶

Beberapa penjelasan diatas dapat peneliti lihat bahwa faktor pendukung disposisi implementor yaitu sikap positif dan komitmen dari implementor terhadap keberhasilan KUBE dengan membangun jejaring pembinaan dan pengembangan KUBE. Selanjutnya pemahaman tentang tujuan program dari implementor bagian teknis yaitu pendamping terhadap tugas dan fungsinya, dan juga melakukan monitoring, evaluasi, dan koordinasi yang dilakukan secara rutin oleh implementor untuk menjaga akuntabilitas.

Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu sinergitas program belum dapat berjalan karena dukungan stakeholder dalam pengembangan usaha belum maksimal. Kemudian profesionalitas tenaga pendamping masih kurang hanya sebatas pengabdian dan kepedulian sosial.

4. Faktor pendukung dan penghambat proses struktur birokrasi

Kebijakan memerlukan kerjasama antar pihak yang terkait dalam implementasinya. Struktur birokrasi merupakan elemen yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan tersebut. Struktur birokrasi yang tidak mendukung akan menimbulkan hambatan dalam proses pelaksanaannya.

Implementasi program KUBE tentunya mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan, dan berdasarkan SOP. Berikut penjelasan dari Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin:

“Untuk pelaksanaan program KUBE ini kami belum ada SOP nya, jadi hanya mengikuti petunjuk dari Pusat. Sebagai turunannya membuat Perbub dimana isi didalamnya mempertegas penyaluran dana kepada masyarakat,

⁷⁶Hasil wawancara dengan anggota KUBE..... Tanggal 24 Oktober 2019.

*penjelasan tentang Tupoks tim koordinasi, dan juga tugas pendamping. Jika sudah demikian pasti pelaksanaan program KUBE ini akan berjalan baik”.*⁷⁷

Keterlibatan Dinas dan pihak lainnya yang terkait dalam melakukan pembinaan dan pengembangan usaha belum berjalan maksimal, masih adanya asumsi bahwa KUBE merupakan tanggung jawab Dinas Sosial. Padahal kenyataannya akan sangat mudah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha apa bila instansi yang terkait dapat berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan program KUBE ini.

Hal ini disampaikan oleh Kasi Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin:

*“Dinas lain menganggap KUBE ini sepenuhnya tanggung jawab Dinas Sosial, sehingga koordinasi yang ditawarkan hanya sebatas basa basi saja. Misalnya seperti usaha pertanian, perikanan, dan lainnya kita sebagai pihak Dinas sosial tidak terlalu paham, oleh karena itu kami membutuhkan bantuan dari Dinas terkait, kan mereka lebih ngerti di bidang seperti itu.”*⁷⁸

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengambil beberapa poin yang menjadi faktor pendukung struktur birokrasi yaitu prosedur pelaksanaan program mengikuti petunjuk Kementerian Sosial, kemudian petunjuk teknis program sudah dituangkan dalam Perbup sehingga menjadi acuan dalam pelaksanaan program KUBE. Sedangkan faktor yang menjadi hambatan yaitu belum adanya SOP secara khusus oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan dalam pelaksanaan program. Koordinasi antar Dinas terkait dalam memberikan pembinaan dan pengembangan belum optimal.

⁷⁷Hasil wawancara dengan Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin. Tanggal 10 Oktober 2019.

⁷⁸Hasil wawancara dengan Kasi Kelbagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin. Tanggal 20 Oktober 2019.

Berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III, bahwa sebuah program dapat berjalan dan berhasil apabila secara keseluruhan faktor tersebut terlaksana. Namun apabila salahsatunya tidak tercapai maka implementasi sebuah program dapat dikatakan gagal.

Tujuan umum program KUBE ini yaitu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Kabupaten Aceh Selatan implementasi program KUBE yang sudah lama di jalankan masih belum bisa meningkatkan kesejahteraan. Melihat indikator dari kesejahteraan itu sendiri menurut Nasikum ada empat (4) indikator yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, diantaranya: (1) adanya rasa aman (*security*), (2) kesejahteraan (*welfare*), (3) kebebasan (*freedom*), dan (4) jati diri (*identity*).

1. Rasa aman, hak atas rasa aman merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar. Karena setiap manusia tentunya membutuhkan keamanan dalam hidupnya.
2. Kesejahteraan, sejahtera merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup seperti kebutuhan material, spiritual dan kebutuhan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya sendiri.
3. Kebebasan, tentunya dalam hal ini kebebasan merupakan bebas untuk melakukan sesuatu sesuai aturan dan tidak melanggar ketentuan yang telah berlaku, juga kebebasan untuk tidak di intervensi oleh tindakan tersebut.
4. Jati diri, setiap orang tentunya memiliki jati diri yang berbeda-beda yang merupakan ciri khas kepribadian seseorang atau suatu bangsa. Oleh karena

itu pentingnya rasa saling menghargai baik secara individu ataupun secara kelompok.

Beberapa indikator kesejahteraan yang dikemukakan oleh nasikum, dalam hal ini melihat tingkat kesejahteraan masyarakat miskin melalui implementasi program KUBE ini, sudah ada indikator yang tercapai namun belum secara keseluruhan. Sehingga bisa di katakan program KUBE yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Selatan masih jauh dari kata maksimal. Oleh karena itu diperlukan solusi agar program ini bisa berdampak untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin agar bisa sejahtera melalui program kelompok usaha bersama.

4.3 Deskripsi Pembahasan

Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan sebagai salah satu instansi yang bertugas melaksanakan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Selatan, sudah menjalankan program KUBE sebagaimana yang di amanatkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun KUBE yang dijalankan belum bisa memberikan keberhasilan yang maksimal. Karena banyak KUBE yang tidak berhasil, sehingga belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota KUBE itu sendiri.

Hal tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutiyarto yang menyatakan bahwa pengurus KUBE tidak dapat ditangani secara maksimal oleh pendamping, karena kendala kurangnya kekompakan dalam KUBE, macetnya

usaha yang dilaksanakan karena harga pakan ternak yang tinggi sedangkan harga jual ternak terlalu murah, dan kendala lainnya akibat faktor alam seperti gagalnya panen karena musim yang tidak sesuai dengan usaha mereka.⁷⁹ Motivasi dalam pelaksanaan KUBE yang dilakukan oleh pendamping KUBE juga masih kurang sudah bisa dikatakan baik.

Hal tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryanto, bahwa untuk mencapai efektivitas Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin diperlukan iklim organisasi yang kondusif dan motivasi yang tinggi. Sehingga para pengurus KUBE harus secara bersama-sama meningkatkan motivasi diri dan anggotanya agar lebih optimal.⁸⁰

Hasil temuan dari Ayu Diah Amalia menyatakan bahwa keberhasilan dan kegagalan KUBE bergantung pada kekuatan dan kemampuan dalam mengelola kelompok. Semakin baik kelompok dikelola maka kelompok akan menjadi dinamis dan memperpanjang usia kelompok. Kegagalan KUBE bukan hanya dari ketidakmampuan anggota menjalankan usaha, kegagalan juga disebabkan oleh faktor pengelolaan kelompok yang buruk.⁸¹

Dari segi kemitraan yaitu pemasaran KUBE yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Selatan juga belum maksimal, karena berbagai faktor salah

⁷⁹ Sutyarto. “Evaluasi Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) Bagi Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) Di Kota Singkawang”. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 2, No.1 Tahun 2015

⁸⁰ Suryanto, Abdul Djalil. “Pengaruh Iklim Organisasi dan Motivasi terhadap efektivitas Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) Di Kota Palangkaraya”. Jurnal Sains Manajemen, Vol. 4, No. 2, 2015

⁸¹ Ayu Diah Amalia. “Dinamika Kelompok Dalam Kelompok Usaha Bersama: Kasus KUBE Cempaka dan KUBE Tulip di Bogor”. Jurnal Sosio Konsepsia, Vol. 6, No. 3, 2017

satunya mengembangkan usaha yang kurang laku di pasaran, dan harga jual produk rendah. Selain itu juga kurangnya partisipasi dari stakeholder.

Dalam hasil penelitian Muhammad dan Karjuni mengungkapkan bahwa kesulitan dalam pemasaran produk, karena sebagian KUBE bergerak dalam usaha makanan atau kuliner sehingga untuk memasukkan produk ke supermarket harus memenuhi syarat dari BPOM serta mendapatkan label halal. Hal tersebut membuat pemasaran hanya dilakukan di warung-warung kecil.⁸² Pemasaran ini sangat erat kaitannya dengan periklanan, dimana sekarang ini iklan atau promosi merupakan salah satu instrumen pemasaran modern, dan hal tersebut tidak lepas dari peran teknologi, salah satunya yaitu media sosial. Melalui berbagai sarana yang mendukung proses pemasaran akan lebih cepat membantu anggota KUBE dalam memperoleh penghasilan usahanya.

Implementasi sebuah program atau kebijakan pada dasarnya tidak bisa terlepas dari hambatan atau kendala. KUBE sebagai salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin masih jauh dari pengharapan. Hal tersebut karena adanya faktor pendukung dan penghambat implementasi program KUBE.

Hasil temuan diatas senada dengan hasil penelitian yang ditemui oleh Anwar Sitepu, menyatakan bahwa secara keseluruhan KUBE tidak dapat bertahan, usaha tidak produktif, asset habis, program tidak mencapai target.⁸³

⁸² Muhammad Hidayat Nasmi, Karjuni Dt. Maani. "Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Bintan Timur Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan". Jurnal Dilektika Publik, Vol. 3, No. 2, 2019

⁸³ Anwar Sitepu. "Analisis Efektifitas Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sebagai Instrumen Program Penanganan Fakir Miskin". Jurnal Sosio Informa, Vol. 2, No. 1, 2016

Secara Nasional program KUBE ini bisa dikatakan tidak berhasil, karena KUBE yang bertahan paling lama hanya satu tahun. Sehingga meningkatkan pendapatan melalui usaha tersebut untuk kesejahteraan masyarakat miskin anggota KUBE masih belum maksimal. Untuk memaksimalkannya maka program KUBE ini harus dapat berhasil paling tidak 80-90 persen, karena hanya KUBE yang berhasil dan berkelanjutan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin khususnya anggota KUBE itu sendiri. Berdasarkan data Kabupaten Aceh Selatan hanya ada 10-15 KUBE yang berhasil dari 60 KUBE selama tahun 2017.

Adapun dampak positifnya program KUBE ini bisa membantu masyarakat miskin untuk memulai usaha, melalui usaha tersebut akan menambahkan pendapatan anggota KUBE, hal ini tentunya akan berpengaruh juga terhadap tingkat kesejahteraan mereka. Kemudian dampak negatifnya yang juga merupakan hambatan pada saat pelaksanaan dilapangan, yaitu timbulnya rasa malas dari masyarakat anggota KUBE untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, Sehingga mereka hanya mengharapkan bantuan saja. Selanjutnya usaha yang dijalankan adalah jenis usaha yang jalan di tempat atau dengan kata lain usaha yang tidak berkelanjutan, usaha yang seperti ini tidak akan memberikan kontribusi yang besar kepada anggota KUBE.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian pada proses implementasi program KUBE di Kabupaten Aceh Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dapat disimpulkan:

1. Implementasi program KUBE di Kabupaten Aceh Selatan melalui tahap persiapan, pelaksanaan, pengembangan, dan tahap kemitraan. Masing-masing KUBE dalam proses pelaksanaannya mengalami dinamika yang berbeda. dari 110 KUBE terbentuk dari tahun 2015 sampai 2017 hanya 40% yang mencapai tahap perkembangan, tahap kemitraan 10-15%, dengan demikian program KUBE ini bisa dinyatakan mengalami kegagalan.
2. Hambatan pelaksanaan Program Kelompok Usaha (KUBE) berdasarkan implementasi yang dikemukakan oleh Edward III, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hanya ada 40% tenaga pendamping yang aktif mendampingi, selanjutnya *Standard Operating Procedure* (SOP) pelaksana program KUBE di Kabupaten Aceh Selatan belum ada sehingga masih mengacu pada petunjuk dari Kementerian Sosial RI.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak yang berperan dalam implementasi Program KUBE agar bisa menetapkan indikator capaian kemajuan KUBE disetiap tahapan KUBE secara jelas, yang menjadi acuan pendamping dalam menetapkan langkah-langkah melalui program kerja KUBE setiap periode.
2. Masyarakat miskin anggota KUBE perlu diberikan sosialisasi tentang KUBE secara mendalam, sehingga bisa meningkatkan kewajiban anggota dalam bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KUBE. Selain itu hal yang terpenting adalah profesionalitas pendamping, dan koordinasi antar stakeholder dalam pembinaan dan pengembangan usaha KUBE.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Arifin Tahir. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta Pusat: PT Pustaka Indonesia Press.
- Istiana Hermawati. (2011). *Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Keban. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kabinet Indonesia Bersatu II, *Program Penanggulangan Kemiskinan*. (Kementrian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik: 2011).
- Moleong, J Lexy. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hamid Patilima. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sahya Anggara. (2016). *Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Satori Djama'an. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soewadji Jusuf. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. (2010). *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Metode*. Bandung: Alfabeta.

Yeremias T. Keban. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*.
Yogyakarta: Gava Media.

Jurnal:

Agus. *Implementasi Program Pendistribusian Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman*. Vol. 3 No. 2, 2014.

Ahmad Imaduddin. *Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Pemberdayaan Fakir Miskin Binaan Dinas Sosial Wilayah Kecamatan Samarinda Utara Di Kota Samarinda*. 2016.

Ahmad Nur Bakhtiar. *Implementasi program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Berbah Sleman Tahun 2013*.
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik Vol. 2 No. 2, 2015.

Asna Aneta. *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 1, No. 1, 2010.

Abdullah Ramadhani. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik Vol. 11 No. 1, 2017.

Amirus Sodik. *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*. Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2, 2015.

Ahmad Sururi. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak*. Jurnal Administrasi Negara Vol. 3 No. 2, 2015.

- Hendrik Yasin. *Upaya Strategis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube)*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 5 No. 1, 2015
- Ibrahim Imron. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Desa Dawuhan, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang*. Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 2 No. 3, 2014.
- Mantiri, S. Michael. *Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe*” Vol 1, No. 2, 2006.
- Mahendra Purnama Yahya. *Implementasi Program Bantuan Pemerintah Dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula Di Kementerian Koperasi Dan UKM (Studi Pada Kabupaten Lombok Tengah)*. Jurnal Profit Vol. 12 No. 2, 2018.
- Mulia Oktariani. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung*. 2017.
- Oktavianus Kondorura. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda*. E-jurnal Administrasi Negara Vol. 6 No. 1, 2018.
- Purnama, S. *Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera*. Vol. 3, No. 1, 2012.

Rosni. *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*. Jurnal Geografi Vol. 9 No. 1, 2017.

Supriyatin. *Analisis Dampak Pelaksanaan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Asli Papua Di Kabupaten Mimika*. Jurnal Kritis (kebijakan, riset dan inovasi) Vol. 2 No. 2, 2017.

Sri Yuni Murti Widayanti & A. Nururrochman Hidayatulloh. *Kinerja Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pengentasan Kemiskinan*. Jurnal PKS Vol. 14, No. 2, 2015.

Yasin Hendrik. *Upaya Strategis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube)*. Vol 5, No. 1, 2015.

Skripsi:

Jheniar Evriliany Akmel. *Analisis Efektifitas Program Raskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018. (Skripsi)

Undang-Undang:

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*. Pasal 3 ayat 1-3 dan Pasal 4.

Republik Indonesia. *Kementrian Sosial Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Kelompok Usaha Bersama*. Pasal 1 ayat 1.

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden RI Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*. Pasal 1 ayat 2.

Republik Indonesia. *Departemen Sosial Tahun 2005 Tentang Kelompok Usaha Bersama.*

Republik Indonesia. *Kementrian Sosial Tahun 2010 Tentang Kelompok Usaha Bersama.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.*



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : 534/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 12 Desember 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Menunjuk Saudara :
1. Dr. Muhammad AR, M. Ed Sebagai pembimbing pertama
2. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. Sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi :
Nama : Mika Rahmayuni
NIM : 150802068
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupten Aceh Selatan

KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 28/02/2019
An. Rektor
Dekan,


Ermita Dewi

Tembusan

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921

Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B- 2214/Un.08/FISIP/PP.00.9/09/2019

04 Oktober 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu

di -

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Mika Rahmayani

NIM : 150802068

Fakultas / Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara

Judul : Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (kub) Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Selatan

Lokasi Penelitian: Dinas social Kabupaten Aceh Selatan

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Dekan,


Ernita Dewi



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

DINAS SOSIAL

Jalan Merdeka No. 36. Telp/Fax. (0656) 323436. Kode Pos : 23711
Email : dinsos.asel@gmail.com, website : www.dinsos.acehselatankab.go.id

TAPAKTUAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 357 / X / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh menerangkan bahwa :

Nama : MIKA RAHMAYUNI
Tempat Tanggal Lahir : Seulekat, 05 Januari 1997
NIS : 150802068
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian ke Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 08 Oktober 2019 Tentang “ *Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Selatan* “

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tapaktuan , 14 Oktober 2019

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN ACEH SELATAN


Drs. DUMAIRI
Pembina TK. I / IV b
NIP. 19631231 199512 1 004

DAFTAR WAWANCARA

1. Kepala Dinas Sosial: pelaksana program atau kebijakan yang telah direncanakan.
 - Bagaimana awal mula program KUBE dilaksanakan di Kabupaten Aceh Selatan?
 - Bagaimana pendapat bapak terkait penerapan program KUBE?
 - Darimana sumber dana bantuan KUBE diberikan? Dan berapa jumlah dana yang diberikan?
 - Bagaimana tingkat keberhasilan KUBE di Kabupaten Aceh Selatan?
2. Kepala bidang kelembagaan & pemberdayaan fakir miskin: bidang yang secara khusus menangani program KUBE.
 - Apa dampak yang terlihat dari penerapan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan?
 - Darimana sumber informasi yang didapatkan masyarakat terkait program KUBE?
 - Bagaimana tingkat pemahaman dan rasa tertarik (minat) masyarakat setelah mendapatkan informasi terkait program KUBE?
 - Siapa saja sasaran atau target dari program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)?
 - Apakah ada rencana dari pemerintah dalam pelaksanaan program KUBE menghambat jalannya program tersebut?
 - Apa saja permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program KUBE?
 - Apakah program KUBE tersebut dapat memandirikan dan meningkatkan pendapatan masyarakat?
 - Apa sajakah usaha untuk meningkatkan keahlian kelompok KUBE?
 - Bagaimana peran KUBE dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat?
 - Upaya apa yang ditempuh untuk mengoptimalkan peran KUBE dalam menangani kemiskinan?
 - Bagaimana cara untuk mengatasi hambatan implementasi KUBE?
 - Perubahan apa setelah adanya KUBE dalam mengatasi kemiskinan?

- Dampak positif apa sajakah yang terjadi dengan adanya KUBE dalam mengatasi kemiskinan?
- Adakah dampak negatif dari KUBE dalam mengatasi kemiskinan?

3. Tenaga pendamping KUBE: mempengaruhi kesuksesan KUBE

- Bagaimana bentuk dan penerapan sosialisasi program KUBE yang dilakukan kepada masyarakat?
- Bagaimana pengetahuan anggota KUBE tentang maksud (tujuan) dari program KUBE?
- Apakah sudah sesuai target kriteria orang-orang yang mendapatkan program KUBE?
- Apakah anggota KUBE adalah masyarakat yang tidak memiliki keterampilan?
- Apakah masyarakat anggota program KUBE dapat mengembangkan pengetahuan mereka terkait tujuan KUBE?
- Bagaimana perubahan dalam bentuk nyata mereka setelah adanya program KUBE?
- Faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program KUBE?
- Apakah kesadaran terhadap nilai-nilai local menjadi faktor pendukung pelaksanaan program KUBE?
- Apakah wujud pengembangan sumberdaya manusia menjadi faktor pendukung keberhasilan program KUBE?
- Bagaimana peran KUBE dalam meningkatkan kemampuan intelektual anggota pengelola?
- Bagaimana pertukaran informasi yang terjadi antara pengelola dan anggota KUBE?
- Bagaimana pengelola KUBE memberikan pengetahuan kepada anggota?
- Apakah pengelola dan anggota paham dan mengerti apa yang harus dilakukan di KUBE?
- Bagaimana peran KUBE dalam meningkatkan kemampuan sosial psikologis bagi anggota?
- Bagaimana motivasi yang diberikan pengelola KUBE kepada anggota untuk mengikuti KUBE?
- Apakah antara pengelola dan anggota KUBE memiliki rasa saling percaya?

- Bagaimana pengelola dan anggota menjaga hubungan baik di KUBE?
- Bagaimana KUBE dalam mencari dukungan di masyarakat, apakah antara pengelola dan anggota saling mendukung?
- Bagaimana menjalin kemitraan dengan masyarakat untuk kemajuan KUBE?
- Bagaimana peran KUBE dalam meningkatkan keterampilan pengelola dan anggota?
- Bagaimana pengelola dalam menyemangati anggota agar tidak malas dan mau berjuang bersama dalam kelompok?
- Bagaimana mengembangkan kemampuan yang dimiliki anggota?
- Apakah kemampuan yang dimiliki anggota sudah sesuai dengan yang dibutuhkan kelompok?
- Bagaimana usaha dalam meningkatkan kemampuan anggota dalam memenuhi kebutuhan dasar?
- Bagaimana interaksi sosial yang terjadi antara pengelola dan anggota?
- Bagaimana meningkatkan kemampuan anggota dalam menghadapi masalah?
- Apa ada peningkatan pendapatan yang didapatkan?
- Bagaimana perkembangan jenis kegiatan di KUBE?
- Adakah kerjasama antar anggota, pengelola dan masyarakat sekitar?
- Bagaimana minat masyarakat mengikuti program KUBE?
- Bagaimana pengelola memberikan pengaruh atau pengetahuan bahwa KUBE berperan dalam menangani kemiskinan?
- Usaha apa yang dilakukan untuk mendukung KUBE dalam menangani kemiskinan?
- Hambatan apa yang ditemui selama ini di KUBE?
- Apakah masyarakat serta tokoh masyarakat mendukung kegiatan di KUBE?

4. Pengurus kelompok penerima bantuan : sasaran KUBE, dan yang merasakan dampak dari program tersebut.

- Bagaimana minat masyarakat mengikuti program KUBE?
- Menurut anda, apakah melalui KUBE dapat menangani kemiskinan?
- Apakah anda mendukung dan memotivasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan di KUBE?
- Bagaimana peran anda dalam mendukung kegiatan di KUBE?

DAFTAR GAMBAR



Gambar: Sosialisasi Program KUBE di Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan



Gambar: Usaha Pala, KUBE Kecamatan Samadua



Gambar: Pertemuan dengan Pendamping KUBE Kecamatan Tapaktuan



Gambar: Pemberian Sosialisasi Kepada Anggota KUBE